



**AKTUALISASI VISI SEJAHTERA  
PARTAI Keadilan Sejahtera  
DPD PARTAI Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh

Shoma Fajar Rohmah

NIM. 3401407023

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2011**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu sosial Unnes pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Juli 2011

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Eko Handoyo, M.Si  
NIP. 19640608 198803 1 001

M. Aris Munandar, S.Sos. M.M  
NIP. 19720724 200003 1 001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Drs. Slamet Sumarto, M. Pd  
NIP. 19610127 198601 1 001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 26 Juli 2011

Penguji Utama

Martien Herna S., S.Sos., M.Si.  
NIP. 19730331 200501 2 001

Penguji I

Drs. Eko Handoyo, M.Si  
NIP. 19640608 198803 1 001

Penguji II

M. Aris Munandar, S.Sos. M.M  
NIP. 19720724 200003 1 001

PERPUSTAKAAN  
UNNES

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Drs. Subagyo, M.Pd  
NIP. 19510808 198003 1 003

## **PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan dari jiplakan karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 26 Juli 2011

Shoma Fajar Rohmah  
NIM. 3401407023



## SARI

**Rohmah, Shoma Fajar.** 2011. *“Aktualisasi Visi Sejahtera Partai Keadilan Sejahtera DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus”*. Skripsi. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Eko Handoyo, M.Si. Pembimbing II M. Aris Munandar, S.Sos, M.M. 103 hlm.

### **Kata Kunci : Aktualisasi, Visi Sejahtera, DPD Partai Keadilan Sejahtera**

Indonesia adalah negara demokrasi. Di negara demokrasi, partai politik adalah bagian tak terpisahkan dari demokrasi. Demokrasi akan menjadi baik ketika partai politik yang ada di dalam negara tersebut secara konsisten mampu memperjuangkan visi, misi dan tujuan partai politik yang telah mereka tetapkan. Partai Keadilan Sejahtera mempunyai visi sejahtera yang dimaknai sebagai keseimbangan antara kebutuhan dan sumber pemenuhan baik secara jasmani maupun rohani. Melalui program kerja dan kiprah kader PKS sebagai anggota DPRD, DPD PKS Kabupaten Kudus mengaktualisasikan visi sejahtera ini. Aktualisasi visi sejahtera ini sangat penting sebagai wujud nyata finalisasi perjuangan politik partai karena masyarakat membutuhkan aksi melalui program kerja partai bukan visi yang cenderung hanya menjadi mimpi-mimpi yang terkadang tidak rasional yang diciptakan partai politik sebagai alat mengarahkan perhatian masyarakat untuk mendukung partai dalam pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aktualisasi visi sejahtera Partai Keadilan Sejahtera dan faktor-faktor pendukung serta faktor-faktor penghambat aktualisasi visi sejahtera Partai Keadilan Sejahtera DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data penelitian meliputi data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari pengamatan di lapangan dan wawancara dengan informan. Data sekunder didapatkan dari AD/ART PKS, Platform Kebijakan Pembangunan PKS, Falsafah Dasar Perjuangan PKS, dan profil PKS untuk mendukung analisis data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas data dengan menggunakan teknik triangulasi. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) aktualisasi visi sejahtera PKS dilaksanakan oleh DPD PKS Kabupaten Kudus melalui kegiatan Pelayanan Rakyat Adil dan Sejahtera (PRAS), pasar murah, Pos wanita Keadilan (PWK), donor darah dan beasiswa. Aktualisasi visi sejahtera terkait dengan perumusan kebijakan di DPRD, Fraksi PKS melalui pendapat-pendapatnya selalu mendukung arah kebijakan pemerintah yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat dan mengkritisi kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan keinginan rakyat, 2) faktor pendukung aktualisasi visi sejahtera adalah: (a) solidaritas partai. Keinginan

anggota untuk menggerakkan organisasi adalah unsur penting dalam suatu manajemen organisasi. Para anggota PKS inilah yang akan melaksanakan program-program partai dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Solidaritas antar anggota PKS sangat kuat, sehingga mereka dapat dikatakan sangat loyal kepada partai ini. Hal ini sangat mendukung lancarnya aktualisasi visi sejahtera PKS, sehingga perpecahan internal partai dapat dihindarkan, (b) soliditas partai. PKS Kudus mempunyai struktur dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa. Tiap struktur harus dikoordinasi agar tetap berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Untuk menjaga soliditas strukturnya, DPD PKS mengadakan rapat koordinasi rutin dengan DPC tiap bulan dan antara DPC dengan Depera dua bulan sekali Faktor penghambat aktualisasi visi sejahtera adalah: (a) keterbatasan dana. Hal ini memang tidak mengurangi tekad PKS untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui iuran dan potongan pajak penghasilan gaji kader PKS yang menjadi anggota DPRD mereka gunakan untuk mendanai berbagai kegiatan yang telah ditetapkan. Kekurangan biaya selalu mereka tanggung bersama. Hanya saja, hal ini membuat PKS lebih memikirkan kegiatan yang lebih efektif agar dana yang tersedia dapat mencapai tujuan partai secara efektif dan efisien, (b) tokoh PKS di Kudus. Di Kudus, PKS belum mempunyai tokoh besar seperti tokoh yang dimiliki PKB, KH. Sya'roni Achmadi. Padahal, orang Jawa dalam menentukan pemimpin masih bersifat patrilineal dan kharisma. Hal ini mengakibatkan PKS susah dalam mengintegrasikan masyarakat, karena PKS bukanlah partai dominan yang mempunyai massa besar di Kudus, (c) Kultur Islam Masyarakat Kudus. Masyarakat Kudus yang mayoritas mempunyai kultur Islam tradisional atau NU menganggap PKS mengusung ide baru yang cenderung mirip dengan Muhammadiyah. Hal ini mengakibatkan masyarakat memiliki antipati terhadap program yang dilaksanakan PKS karena PKS dianggap tidak sepaham dengannya. Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut. 1) bagi DPD PKS Kabupaten Kudus, agar konsisten dalam melaksanakan program-program kerja partai, misalnya pelatihan keterampilan memasak, sehingga kedekatan PKS dengan masyarakat tidak hanya dalam rangka strategi pemenangan pemilu saja, 2) bagi kader, agar meningkatkan keaktifan di PKS tidak hanya menjelang pemilu saja, karena kader bagi suatu partai adalah hal yang sangat penting untuk melaksanakan program partai demi tercapainya visi, misi, dan tujuan partai yang telah ditetapkan.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

1. Visi bagi suatu partai politik adalah hal yang sangat penting karena akan memberikan janji dan kepastian atas perjuangan partai. Agar visi tidak hanya menjadi sekadar mimpi-mimpi belaka untuk mendapatkan dukungan massa, aktualisasi visi harus dilakukan (Firmanzah).
2. *God comes helps us when we are hurting and fighting to finish* (Derek Redmond).

### Persembahan:

Alhamdulillah, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak dan ibu tercinta yang selalu mendoakan dan tidak pernah sekalipun memaksakan kehendak apapun dalam hidup saya.
2. Kakak dan adikku, kalian adalah alasan yang membuat saya tetap semangat belajar ketika keadaan membuat saya tertekan.
3. Riska Ariastuti, teman seperjuangan yang selalu menjadi tempat bercerita di kala suka maupun duka. *Let's we reach our dreams, girls.*
4. Sahabat-sahabatku Apriyanti, Efi, Firman, Lelly, Mahpiatun, Nia, Novi, Istianah, dan Sovi. *When I see your smiles it heals the pain in my heart.*
5. Teman-teman seperjuangan PPKn Angkatan 2007.
6. Teman-teman asrama putri Trisanja.
7. Almamaterku yang tercinta.

## PRAKATA

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, dengan rahmat-Nya skripsi dengan judul “Aktualisasi Visi Sejahtera Partai Keadilan Sejahtera DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus” dapat terselesaikan.

Penyusunan karya tulis ini diperoleh berkat bantuan dan motivasi dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang berjasa dalam penyusunan karya tulis ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Subagyo, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
3. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd, Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan.
4. Drs. Eko Handoyo, M.Si, Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memotivasi, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. M. Aris Munandar, S.Sos, M.M, Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memotivasi, sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan.
6. Martien Herna S., S.Sos., M.Si., Dosen Penguji Utama yang telah menguji dan membantu perbaikan skripsi ini.
7. Drs. Sumarno, Dosen Wali yang telah memotivasi agar meningkatkan prestasi akademik.



8. Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera beserta anggotanya yang telah memberikan izin penelitian di DPD PKS Kabupaten Kudus dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga penulis di Kudus, terima kasih atas segala materiil dan immaterial yang telah diberikan.
10. Teman-teman PKn 2007, saya senang bisa belajar dengan kalian.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Semarang, 26 Juli 2011

Penulis



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SARI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Batasan Istilah.....	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR</b>	
A. Landasan Teori.....	9
1. Partai Politik .....	9

a. Partai Politik sebagai Lembaga Politik.....	10
b..Fungsi Partai Politik.....	11
2. Manajemen Partai Politik .....	15
3. Formulasi Kebijakan Umum.....	24
a. Pengertian Kebijakan Umum.....	24
b. Tahap-Tahap Perumusan Kebijakan.....	25
c. Peran Serta Partai Politik dalam Perumusan.....	
Kebijakan Umum.....	27
4. Manajemen Partai Keadilan Sejahtera.....	28
a. Sejarah Perkembangan Ideologi Partai Politik.....	
di Indonesia.....	28
b. Visi Partai Keadilan Sejahtera.....	31
c. Aktualisasi Visi Sejahtera.....	33
d. Kiprah Partai Keadilan Sejahtera.....	35
B. Kerangka Berfikir.....	37
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Fokus Penelitian.....	39
D. Sumber Data Penelitian.....	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	40
F. Keabsahan Data.....	41
G. Analisis Data .....	42

H. Prosedur Penelitian.....	43
-----------------------------	----

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### A. Hasil Penelitian

1. Profil DPD PKS Kabupaten Kudus .....	46
a. Visi PKS .....	49
b. Misi PKS .....	49
c. Tujuan PKS .....	50
d. Nama, Lambang, dan Landasan Filosofis PKS .....	50
e. Struktur Organisasi dan Program DPD PKS Kab. Kudus	52
f. Sarana dan Prasarana .....	54
g. Pengurus dan Anggota.....	55
2. Aktualisasi Visi Sejahtera PKS DPD PKS Kabupaten Kudus	56
3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Aktualisasi Visi Sejahtera PKS DPD PKS Kabupaten Kudus .....	77

##### B. Pembahasan

1. Aktualisasi Visi Sejahtera PKS DPD PKS Kabupaten Kudus.	88
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Aktualisasi Visi Sejahtera PKS DPD PKS Kabupaten Kudus .....	93

#### **BAB V PENUTUP**

1. Simpulan .....	100
2. Saran.....	101

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	102
-----------------------------	-----

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1: Teori Sistem Lord Acton .....	10
Bagan 2: Siklus Proses Manajemen .....	15
Bagan 3: Kerangka Berpikir.....	39
Bagan 4: Tahap Analisis Data Miles and Huberman .....	43
Bagan 5: Prosedur Penelitian .....	45



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

Lampiran 2. Surat keterangan telah melaksanakan penelitian

Lampiran 3. Instrumen Penelitian dan Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Data Informan

Lampiran 5. Data Donor Darah

Lampiran 6. Contoh Pandangan Fraksi PKS

Lampiran 7. Contoh Manhaj Tarbiyah PKS

Lampiran 8. Foto



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam suatu negara demokrasi, partai politik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem demokrasinya (Sunarto, 2004:27). Partai politik yang baik adalah ketika partai politik secara konsisten mampu memperjuangkan visi, misi, dan tujuan partai politik yang telah mereka tetapkan.

Partai politik dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan partai politik adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Budiardjo, 2008:403).

Salah satu fungsi partai politik di negara demokrasi adalah sebagai sarana artikulasi politik. Hal ini dapat diartikan bahwa partai politik berfungsi untuk menyuarakan atau memperjuangkan aspirasi rakyat yang beragam yang telah disatukan menjadi kehendak bersama melalui berbagai cara, misalnya dengan mendukung kader partai politik yang kompeten atau individu di luar partai politik yang dianggap masih sepaham dengan partai politik itu untuk menjadi pejabat di bidang pemerintahan dengan harapan kebijakan-kebijakan umum (*public policy*) yang akan dihasilkan dapat dipengaruhi (*influenced*) oleh partai politik yang bersangkutan. Bahkan, diharapkan kebijakan-kebijakan itu inputnya berasal dari partai politik tersebut.

Pasca reformasi tahun 1998, terjadi fenomena yang sangat menonjol, yaitu munculnya banyak partai baru di antara partai-partai terdahulu yang ikut dalam verifikasi untuk menjadi peserta pemilihan umum tahun 1999. Iklim politik di Indonesia penuh dengan persaingan terbuka. Partai politik membutuhkan suatu metode yang dapat membantu mereka dalam memasarkan ideologi partai, karakteristik pemimpin partai, program kerja partai kepada masyarakat, dan sebagainya. Konsep *marketing* maupun manajemen partai politik perlu diterapkan untuk membangun hubungan dengan pemilih. Implementasi konsep-konsep visi, misi, dan tujuan partai perlu mereka wujudkan melalui berbagai kegiatan sebagai wujud nyata atas fungsi partai politik sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat.

Salah satu partai politik baru yang muncul sebagai kontestan pemilihan umum tahun 1999 adalah Partai Keadilan. Tidak terpenuhinya aturan syarat minimal perolehan suara sah (*electoral threshold*) sebesar 3% seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 pada pemilihan umum 1999 oleh Partai Keadilan, maka untuk dapat mengikuti pemilu 2004 dipersiapkan sebuah partai yang dapat mengakomodasi keinginan Partai Keadilan untuk tetap berkontribusi pada perjuangan umat. Pada tanggal 3 Juli 2003, bergabunglah Partai Keadilan dengan Partai Keadilan Sejahtera yang secara resmi merubah namanya menjadi Partai Keadilan Sejahtera, disingkat PKS. Partai Keadilan Sejahtera yang dipimpin oleh Dr. Hidayat Nur Wahid, M.A. ini mempunyai visi “terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat”.

Dalam pandangan masyarakat, sejahtera cenderung identik dengan kemakmuran di mana segala kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Sementara



itu, Partai Keadilan Sejahtera memaknai sejahtera sebagai pemenuhan kebutuhan lahir batin manusia di mana terjadi keseimbangan antara kebutuhan dan sumber pemenuhannya. Kesejahteraan sama dengan keseimbangan (*tawazun*) hidup yang merupakan hasil dari kemampuan seseorang memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya (ruh, akal, dan jasad).

Pemaknaan sejahtera ini merupakan visi sejahtera PKS. Visi partai ini memerlukan aktualisasi atau wujud nyata finalisasi perjuangan partai, misalnya melalui kader di lembaga perwakilan rakyat untuk mempengaruhi kebijakan umum maupun mengkritisi kebijakan umum yang menurut mereka tidak menguntungkan rakyat. Wujud nyata visi sejahtera PKS juga dilakukan melalui program-program kerja partai, misalnya pemberdayaan perempuan melalui Pos Wanita Keadilan (PWK).

Kudus merupakan kota yang masyarakatnya dominan beraliran Islam Nahdlatul Ulama (NU). Sementara itu, PKS dikenal sebagai partai yang Islamnya “*kenceng*” atau kaku, partai yang menegakkan nilai Islam secara konsisten. Anggota PKS memang heterogen, ada yang NU, ada pula yang Muhammadiyah. Perbedaan cara pandang Islam atau mazhab yang dianut masyarakat Kudus merupakan tantangan bagi PKS untuk menyatukan budaya yang berbeda dan mengkomunikasikan ideologi masyarakat dalam beragama, sehingga terbentuk kehendak bersama yang menjadi masukan bagi DPD PKS Kabupaten Kudus untuk mewujudkan visi sejahtera yang telah dicita-citakan.

Kader PKS di DPRD Kabupaten Kudus periode 2004-2009 berjumlah empat orang, sehingga mereka mampu membentuk fraksi di DPRD Kabupaten Kudus. Dengan terbentuknya fraksi sendiri, kebebasan dalam

mengutarakan pendapat lebih fleksibel. Fungsi dewan di DPRD juga diharapkan lebih maksimal untuk memberikan pengaruh (*influence*) dalam perumusan kebijakan umum. Dengan memberikan pengaruh ideologi partai di masyarakat, diharapkan visi sejahtera yang diperjuangkan PKS dapat tercapai. Melalui perjuangan visi, baik melalui kader di DPRD maupun melalui program-program kerja partai dapat diketahui pada akhirnya apakah visi sejahtera yang mereka cantumkan sebagai nama partai politik sekadar aksen ataukah tidak.

Aktualisasi visi partai harus dilakukan karena masyarakat membutuhkan aksi melalui program kerja partai bukan hanya janji yang cenderung hanya menjadi mimpi-mimpi yang terkadang tidak rasional yang diciptakan partai politik sebagai alat mengarahkan perhatian masyarakat untuk mendukung partai dalam persaingan politik.

Berdasarkan latar belakang inilah, peneliti merasa perlu untuk meneliti tentang “Aktualisasi Visi Sejahtera Partai Keadilan Sejahtera DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas bahwa visi partai perlu diaktualisasikan sebagai wujud finalisasi perjuangan politik, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah aktualisasi visi sejahtera Partai Keadilan Sejahtera DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus?

2. Apakah faktor–faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung dalam mengaktualisasikan visi sejahtera Partai Keadilan Sejahtera DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan–permasalahan yang ada maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana aktualisasi visi sejahtera Partai Keadilan Sejahtera DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui faktor–faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung yang dihadapi DPD Partai Keadilan Sejahtera dalam mengaktualisasikan visi sejahtera Partai Keadilan Sejahtera.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat baik itu manfaat teoritis maupun manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan bahwa demokrasi yang baik adalah ketika partai politik yang ada di dalam negara tersebut secara konsisten mampu menyatakan dan memperjuangkan visi, misi dan tujuan partai politik yang telah mereka tetapkan. Sehubungan dengan itu, aktualisasi visi sejahtera PKS akan menunjukkan apakah kata “sejahtera” dalam nama partai sekadar aksan untuk menarik simpati masyarakat atau tidak.

b. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan aktualisasi visi sejahtera Partai Keadilan Sejahtera.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus

Hasil penelitian ini mengetahui sejauh mana aktualisasi visi sejahtera telah dilaksanakan, sekaligus memberikan masukan mengenai program partai yang sesuai dengan kondisi masyarakat Kudus saat ini.

## E. Batasan Istilah

Istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Aktualisasi Visi

Aktualisasi berasal dari bahasa Inggris *actualization* [noun] yang berarti pewujudan atau pelaksanaan (Cambridge *dictionary*).

Visi merupakan tujuan jangka panjang yang ingin diwujudkan oleh pihak tertentu. Visi suatu partai politik merupakan pernyataan yang menjelaskan mengenai kondisi dan situasi masyarakat yang ideal yang ingin diwujudkan oleh partai politik (Firmanzah, 2008).

Visi partai politik adalah hal yang sangat penting karena visi ini akan mendeskripsikan dan memberikan semacam janji dan kepastian dari perjuangan partai politik tersebut. Aktualisasi visi sangatlah penting karena masyarakat akan menilai visi mereka memang rasional atau hanya

mimpi-mimpi belaka yang mereka gunakan untuk menarik simpati masyarakat.

Aktualisasi visi dalam penelitian ini dapat dikatakan terealisasi jika program kerja partai politik benar-benar dijalankan sesuai dengan apa yang diperjuangkan partai politik.

## 2. Visi Sejahtera

MPP PKS (2007) menjelaskan bahwa sejahtera diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan lahir batin manusia di mana terjadi keseimbangan antara kebutuhan dan sumber pemenuhannya. Kesejahteraan sama dengan keseimbangan (*tawazun*) hidup yang merupakan hasil dari kemampuan seseorang memenuhi tuntutan–tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya (ruh, akal, dan jasad).

## 3. Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera

DPD PKS adalah struktur dewan kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera di tingkat kota/ kabupaten. DPD yang akan dijadikan sebagai objek penelitian adalah DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu:

### 1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan, sari, motto dan persembahan, prakata, daftar isi, daftar bagan, dan daftar lampiran.

### 2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

a. Bab I Pendahuluan

Bab I mengemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

b. Bab II Landasan Teori

Bab II berisi tentang teori-teori tentang partai politik, manajemen partai politik, formulasi kebijakan umum, dan manajemen Partai Keadilan Sejahtera.

c. Bab III Metode Penelitian

Bab III meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, keabsahan data, analisis data, dan prosedur penelitian.

d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV mengemukakan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang aktualisasi visi sejahtera PKS dan faktor yang mendukung serta menghambat dalam aktualisasi visi sejahtera tersebut.

e. Bab V Simpulan dan Saran

Bab V mengemukakan tentang simpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

### **3. Bagian Akhir Skripsi**

Pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. Landasan Teori

##### 1. Partai Politik

###### a. Partai Politik sebagai Lembaga Politik

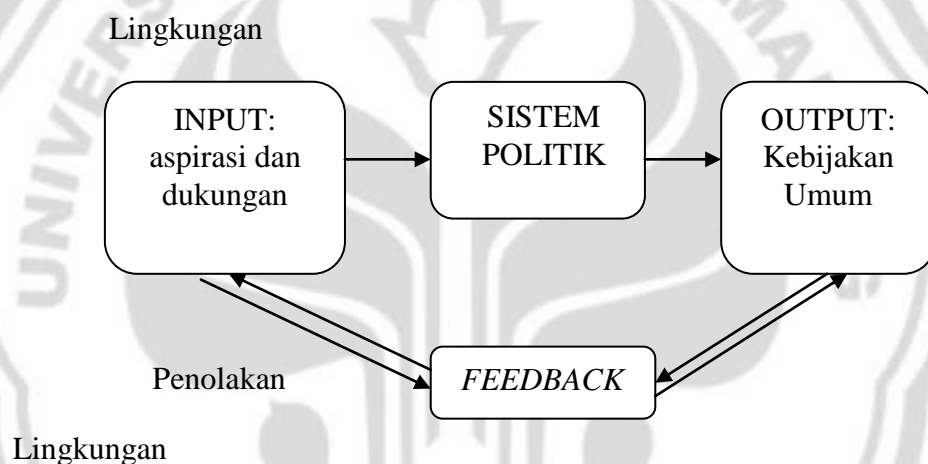
Partai politik merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dalam suatu negara demokrasi. Partai politik dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama (Budiardjo, 2008:403). Partai politik menurut definisi Prof. Mirriam Budiardjo, dibentuk dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Motif utama dalam berpolitik adalah mendapatkan kekuasaan yang terlegitimasi. Melalui kekuasaan, mereka akan memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan umum baik tingkat lokal maupun nasional. Kekuasaan ini didapatkan melalui mekanisme pemilu.

Lord Acton (Sunarto, 2004: 3) menjelaskan dalam teori sistem bahwa partai politik memang mempunyai peran dalam menjembatani kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dengan cara mempengaruhi kebijakan publik.

Partai politik berperan dalam menyatukan berbagai aspirasi dari masyarakat untuk diperjuangkan menjadi kepentingan bersama agar kebijakan publik benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat. Masyarakat dalam sistem politik juga berperan tidak hanya memberikan

aspirasi tetapi juga mendukung pemerintah sehingga pemerintah mampu melaksanakan fungsinya dengan baik. Dalam sistem politik berlaku mekanisme umpan balik (*feedback*), artinya jika kebijakan pemerintah ini sesuai dengan aspirasi rakyat maka dukungan dari masyarakat kepada pemerintah akan semakin besar. Namun, jika kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat maka akan muncul penolakan sehingga, masyarakat akan menarik dukungannya terhadap pemerintah dan legitimasi pemerintahpun akan lemah. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Bagan 1. Teori Sistem Lord Acton

Cochran mengatakan bahwa keterlibatan dalam dunia politik dilatarbelakangi oleh faktor yang berkaitan dengan semua kebijakan yang dapat meningkatkan kesempatan untuk pemenuhan kebutuhannya, misalnya untuk mendapatkan kesempatan menentukan arah dan kebijakan politik (Firmanzah, 2008).

Salah satu peran politikus adalah membuat kepentingan individu atau kelompok individu yang bersifat privat dan *self-interest* menjadi urusan yang menyangkut kepentingan publik melalui argumen-argumen



yang rasional dan objektif (Firmanzah, 2008: 53). Pemilu merupakan sarana menjadikan gagasan agar aspirasi kelompok itu bisa menjadi kepentingan bangsa dan negara. Pemenang dari pemilu akan mendapatkan kekuasaan yang terlegitimasi sehingga mempunyai kewenangan menentukan arah kebijakan umum.

Partai politik adalah suatu lembaga formal yang merupakan sarana mengorganisasikan dukungan dan aspirasi masyarakat melalui mekanisme pemilihan umum untuk menempatkan wakil atau kadernya di dalam lembaga perwakilan rakyat.

Partai politik memang mempunyai *influence* atau pengaruh terhadap kebijakan umum (Firmanzah, 2008). Oleh karena itu, partai politik harus bersifat *independent*, tidak terpengaruh oleh pemerintah sehingga partai politik sebagai lembaga politik mampu melaksanakan fungsinya dengan baik, salah satunya mampu mempengaruhi kebijakan umum sesuai aspirasi rakyat bukan atas tekanan pemerintah.

#### **b. Fungsi Partai Politik**

Aktivitas politik perlu dibentuk dalam suatu lembaga formal sehingga aspirasi dapat diperjuangkan melalui sistem yang formal pula. Jadi, dibutuhkan suatu sistem bagi kepentingan dan aspirasi yang ada di dalam partai politik.

Menurut Firmanzah dalam bukunya “Mengelola Partai Politik”, secara garis besar peran dan fungsi partai politik dibedakan menjadi dua, internal organisasi dan eksternal organisasi. Peran dan tugas internal organisasi, dalam hal ini organisasi partai politik berperan penting dalam pembinaan, pendidikan, pembekalan, kaderisasi, dan melanggengkan

ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik itu. Peran dan fungsi eksternal, organisasi partai politik berkaitan dengan masyarakat luas, bangsa, dan negara. Kehadiran partai politik juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.

Partai politik sebagai bagian dari negara yang demokrasi mempunyai beberapa fungsi. Fungsi partai politik menurut Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang partai politik dalam pasal 11 adalah sebagai sarana:

- 1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- 3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- 4) Partisipasi politik warga negara Indonesia.
- 5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Fungsi partai politik di negara demokrasi yang lebih rinci adalah:

- 1) Sebagai sarana komunikasi politik.

Menurut Budiardjo, partai politik menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran dalam masyarakat berkurang. Partai politik

menyampaikan informasi politik secara luas kepada masyarakat. Pesan politik atau informasi politik ini bertujuan membentuk opini publik. Partai politik menggunakan media massa untuk menyalurkan pesan politik ini (Rahman, 2007).

Hasil dari sebuah komunikasi politik adalah rendahnya tingkat konflik yang ada di dalam entitas yang dikomunikasikan itu (Rifai, 2010: 40).

2) Sebagai sarana sosialisasi politik.

Partai politik membantu memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara kepada individu. Pembentukan sikap politik ini membutuhkan waktu yang panjang dan berlangsung berangsur-angsur mulai dari usia anak-anak sampai dewasa (Rifai, 2010: 35).

3) Sebagai sarana partisipasi politik.

Partai politik berfungsi untuk mendorong masyarakat agar ikut aktif dalam kegiatan politik. Biasanya dilakukan melalui indoktrinasi ideologi, platform, dan asas partai kepada anggota dan masyarakat yang ada dalam jangkauan partainya (Rahman, 2007).

4) Sebagai sarana artikulasi kepentingan.

Partai politik berfungsi untuk menyalurkan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan, dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik (Rifai, 2010: 31).

5) Sebagai sarana agregasi kepentingan.

Fungsi partai politik untuk memadukan semua aspirasi yang ada dalam masyarakat yang kemudian dirumuskan sebagai program politik dan diusulkan kepada badan legislatif dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan, dengan cara pemenuhan kepentingan jika kelompok kepentingan mau mendukung calon itu (Rahman, 2007).

6) Sebagai pembuat kebijakan.

Fungsi partai politik sebagai pembuat kebijakan dimiliki setelah partai politik meraih dan mempertahankan kembali kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif di dalam pemerintahan secara konstitusional. Partai politik akan memberikan pengaruhnya dalam membuat kebijakan yang akan digunakan dalam suatu pemerintahan (Rahman, 2007).

7) Sebagai sarana rekrutmen politik.

Tujuan partai politik adalah untuk meraih kekuasaan. Untuk itu, mereka melakukan rekrutmen terhadap pemimpin-pemimpin politik yang mampu mendukung kekuasaan yang mereka raih (Winarno, 2007: 98).

8) Sebagai sarana pengatur konflik.

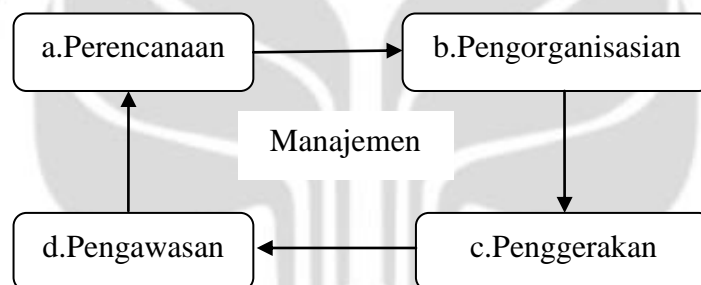
Huntington (Winarno, 2007) mengatakan bahwa partisipasi tanpa organisasi akan melahirkan gerakan massal. Oleh karena itu, partai politik berperan dalam menjembatani berbagai konflik kepentingan yang ada dalam masyarakat untuk disalurkan dalam sistem politik.

## 2. Manajemen Partai Politik

Partai politik telah menjadi bagian dari sistem politik. Partai politik sebagai suatu organisasi, tentunya mempunyai manajemen untuk mengelola organisasi itu dengan baik.

Dalam suatu organisasi, untuk dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan maka dilakukan serangkaian aktivitas yang saling berhubungan. Rangkaian aktivitas ini merupakan proses manajemen. Manajemen juga dapat diartikan sebagai proses pendayagunaan semua orang dan fasilitas (Bafadal, 2009: 39).

Menurut Terry (Sutomo, 2007: 12), proses manajemen yang bersifat mendasar meliputi:



Bagan 2. Siklus Proses Manajemen

### a. Perencanaan (*planning*)

Merencanakan merupakan kegiatan menentukan apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Menurut Kauffman, perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan serta sumber untuk mencapai tujuan itu seefektif mungkin (Sutomo, 2007).

Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap berikut ini (Handoko, 2001):

- 1) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.
- 2) Merumuskan keadaan saat ini.
- 3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan.
- 4) Mengembangkan rencana untuk pencapaian tujuan.

Perencanaan yang baik menurut banyak pakar manajemen (Bafadal, 2009: 42) antara lain adalah didasarkan pada keadaan nyata masa kini dan masa depan.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Menurut Handoko (Sutomo, 2007), pengorganisasian merupakan proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan, dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien.

Pengorganisasian menurut Bafadal (2009) adalah keseluruhan proses pengeompokkan semua tugas, tanggung jawab, wewenang, dan komponen dalam proses kerja sama sehingga tercipta suatu sistem kerja yang baik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Prosedur pengorganisasian adalah:

- 1) Pemerincian pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 2) Pembagian beban kerja secara total ke dalam kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh satu individu, tidak terlalu berat atau ringan serta sesuai kualifikasi orang yang disertai tugas.
- 3) Pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi agar perhatian

para anggota organisasi fokus pada tujuan organisasi dan mengurangi ketidakefisienan serta konflik.

- 4) Melakukan *monitoring* dan mengambil langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas (Sutomo, 2007).

c. Penggerakan (*actuating*)

Perencanaan dan pengorganisasian adalah hal vital dalam manajemen tetapi perlu adanya tindak lanjut atau penggerakan agar dihasilkan *output*. Hal ini membuat penggerakan dalam manajemen sangat penting.

Penggerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien, efektif, dan ekonomis (Sutomo, 2007).

Hal yang selalu berkaitan dengan fungsi penggerakan adalah kaitan fungsi ini dengan keseluruhan kegiatan manajemen yang berkaitan dengan manusia beserta segala jenis kepentingan dan kebutuhannya.

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan menurut Bafadal (2009) adalah fungsi manajemen yang mutlak harus dilakukan dalam setiap organisasi. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan dapat digunakan untuk mengetahui hasil kerja dan koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi.

Berkaitan dengan manajemen partai politik, menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, MS Kaban, mengatakan bahwa manajemen partai politik adalah manajemen yang berbicara soal kekuasaan yang pada akhirnya bermuara kepada upaya-upaya merebut kekuasaan itu sendiri (Riz, 2011). Manajemen suatu partai politik juga berkaitan dengan pengelolaan partai, yaitu suatu proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi partai, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Setelah mengetahui proses manajemen secara umum, maka dapat dikatakan manajemen partai politik sangat penting karena manajemen merupakan hal yang utama bagi tumbuh dan berkembangnya suatu parpol, terutama parpol baru. Keberhasilan suatu parpol baru, tolok ukurnya adalah manajemennya dan bukan jumlah dukungan massa, pengurus, maupun keuangannya.

Beberapa aspek manajemen partai politik menurut Kompas (2010) adalah:

a. Manajemen Strategis Partai Politik

Partai politik mempunyai ideologi yang mereka gunakan sebagai identitas partai yang membedakannya dari partai politik yang lain. Ideologi dalam hal ini adalah sistem nilai dan faham yang menjelaskan mengapa partai politik itu harus ada. Selain itu, ideologi menjadi dasar perjuangan atas cita-cita yang ingin diwujudkan partai politik (Firmanzah, 2008: 105).



Ideologi partai politik adalah suatu hal yang kompleks. Untuk menganalisisnya dapat diketahui dari struktur organisasi, program partai yang ditawarkan kepada publik, karakter kandidat yang didukung dan sebagainya. Unsur-unsur penyusun ideologi partai politik yang dapat kita cermati (Firmanzah, 2008: 106) adalah:

1) Visi dan misi partai politik

Visi partai politik adalah tujuan jangka panjang partai politik. Visi adalah pernyataan mengenai kondisi dan situasi masyarakat ideal yang ingin diciptakan oleh partai politik. Visi bagi suatu partai politik sangat penting karena visi akan memberi gambaran kepada masyarakat dan kepastian tentang perjuangan partai. Kejelasan visi akan membantu dalam penyusunan tujuan partai maupun strategi untuk mencapainya. Walaupun terkadang visi ini dianggap tidak rasional, tetapi visi sangat berperan dalam memberikan arah dan petunjuk bagi penyusunan rencana strategis partai politik.

Sementara itu, misi adalah alasan yang menjelaskan mengapa suatu organisasi itu harus ada. Organisasi politik didirikan untuk memfasilitasi berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat, sehingga kepentingan itu diharapkan oleh masyarakat dapat diperjuangkan secara formal. Pernyataan misi partai politik akan memberikan gambaran tentang nilai dan faham yang dianut serta landasan bagi hal yang diperjuangkan.

King dan Cleland (Fred, 2008) merekomendasikan agar organisasi mengembangkan visi dan misi secara hati-hati karena:

a) Untuk memastikan tujuan dasar organisasi.

- b) Memberikan standar untuk mengalokasikan sumber daya organisasi.
- c) Untuk menciptakan kondisi organisasi yang umum.
- d) Titik utama bagi individu untuk mengidentifikasi tujuan dan arah organisasi.
- e) Menerjemahkan tujuan dasar organisasi sehingga parameter waktu, biaya dan kinerja dapat dievaluasi dan dikontrol.

## 2) Strategi partai politik

Strategi dibutuhkan partai politik guna mencapai tujuan jangka panjang maupun tujuan antara. Strategi dapat dibedakan dalam beberapa hal, yaitu:

- a) Strategi yang terkait dengan penggalangan dana dan mobilisasi massa untuk membentuk opini publik selama masa pemilihan umum. Strategi ini untuk memenangkan suara dalam pemilihan umum agar mampu mengarahkan kebijakan politik negara.
- b) Strategi untuk berkoalisi dengan partai politik lain.
- c) Strategi partai politik dalam mengembangkan dan memberdayakan organisasi partai politik meliputi penggalangan dana, kaderisasi, mekanisme pemilihan pemimpin partai, dan sebagainya.
- d) Strategi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, seperti peraturan pemerintah, pers, dan media.

## 3) Platform partai politik

Platform partai memuat panduan umum dan garis besar arah kebijakan partai dalam kontribusinya terhadap permasalahan bangsa dan negara. Platform partai memuat hal-hal penting dan mendasar yang

harus dilakukan, seperti program kerja dan isu politik. Platform partai menjadi landasan dalam penyusunan hal-hal yang lebih konkret. Platform partai biasanya berisikan tujuan dan prinsip dasar (asas) partai politik yang bersangkutan.

b. Manajemen Pemasaran Partai Politik

Manajemen pemasaran umumnya digunakan dalam kegiatan bisnis atau organisasi nirlaba seperti rumah sakit. Berkembangnya zaman yang semakin terbuka dan bebas membuat manajemen pemasaran juga digunakan oleh partai politik dalam upaya memenangkan kompetisi antar partai politik sehingga mampu memuaskan pihak-pihak yang harus diperhatikan kepentingannya.

Pemasaran dalam konteks partai politik adalah penyampaian sesuatu atau gagasan dari partai politik kepada calon konstituennya untuk memperoleh dukungan dan kepuasan sebesar-besarnya bagi pendukungnya (Widagdo, 1999: 5).

Partai politik memerlukan strategi dalam usahanya memperoleh dukungan dari masyarakat. Partai politik akan mencari cara agar strategi yang digunakan membedakannya dengan partai pesaing, menunjukkan bahwa partainya yang paling kompeten untuk dipercaya menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Strategi pemasaran berguna untuk mempengaruhi konsumen, dalam hal ini masyarakat, dalam mengambil keputusan.

Beberapa pendekatan kerangka berpikir strategi pemasaran partai politik (Widagdo, 1999: 23), adalah:

1) Segmentasi

Segmentasi ini dengan cara memilah sekelompok orang yang mempunyai tanggapan sama, misalnya berdasarkan wilayah (segmentasi geografik), jenis kelamin dan umur (segmentasi demografik), psikologi (segmentasi psikografis), dan berdasarkan tanggapan atau sikap (segmentasi perilaku).

## 2) *Targeting*

*Targeting* adalah fokus pada segmen tertentu untuk menjadi pendukung utama partai, misalnya PKB fokus pada kalangan warga NU, PAN fokus pada warga Muhammadiyah, dan PDI yang fokus pada masyarakat menengah ke bawah yang diberi sebutan “wong cilik”.

## 3) *Positioning*

*Positioning* adalah merancang pemasaran dan citra partai dalam benak konstituen, misalnya memposisikan partai sebagai partai yang selalu membela keadilan dan partai Islam dengan berbagai simbol Islam sebagai pencitraan partai tersebut.

### c. Manajemen Sumber Daya Manusia

Kehadiran partai politik dalam sistem demokrasi tidak dapat lepas dari peran dan fungsinya karena partai politik dapat menempatkan kader-kadernya dalam jabatan pemerintahan yang akan menentukan arah kebijakan publik. Partai politiklah yang paling bertanggungjawab untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Perlu suatu proses pendidikan baik yang bersifat formal maupun non-formal untuk membentuk jiwa dan karakter pemimpin (Firmanzah, 2008: 70).

Salah satu peran dan fungsi partai politik secara internal adalah melakukan kaderisasi. Kaderisasi meliputi menyiapkan regenerasi di masa yang akan datang

termasuk memberikan pembinaan dan edukasi, baik dalam kepentingan partai politik maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai saat ini, belum ditemukan adanya model kaderisasi partai politik yang sistematis, kecuali kegiatan temporal menjelang pemilu maupun pemilukada (Rifai, 2010: 72).

Dalam sistem kaderisasi terjadi transfer pengetahuan politik, tidak hanya yang terkait dengan sejarah, visi, misi dan strategi partai politik tetapi juga mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan bangsa dan negara. Dalam kaderisasi juga terjadi transfer keterampilan dan keahlian berpolitik. Partai politik bertanggungjawab menghasilkan calon pemimpin yang berkualitas yang mampu bersaing dengan partai lain dalam pemilu.

Sistem kaderisasi perlu dilaksanakan secara transparan kepada semua kader yang berpotensi. Perlu juga diciptakan persaingan sehat demi terciptanya calon pemimpin yang jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

### **3. Formulasi Kebijakan Umum**

#### **a. Pengertian Kebijakan Umum**

Istilah kebijakan publik telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kebijakan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) oleh Pemerintah RI belum lama ini. Secara umum, kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor misalnya pejabat maupun lembaga pemerintah atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarno, 2007: 16).

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone yang dikutip oleh Jones (Wahab, 2004). Ia mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

Dye (Indiahono, 2009: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *whatever government choose to do or not to do* yang berarti apapun kegiatan pemerintah baik eksplisit maupun implisit. Interpretasi kebijakan pemerintah dimaknai dengan dua hal penting yaitu kebijakan harus dilakukan oleh badan pemerintah dan kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Sementara itu, menurut Anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep ini membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif (Winarno, 2007: 18).

Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Jadi, ada pihak yang menguasai dan ada pihak yang dikuasai.

Setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Tujuan bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat, yang dituang dalam kebijakan (*policies*) oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini Pemerintah (Budiardjo, 2008:20).

Sama halnya dengan Pemerintah yang membuat kebijakan umum maka partai politik juga mempunyai kebijakan partai bahkan juga mampu menghasilkan kebijakan umum melalui pengaruh yang ia berikan melalui kader-kadernya di badan perwakilan rakyat.

Ideologi politik dari suatu partai dapat tercermin dari kebijakan-kebijakan yang dibuat partai baik yang berlaku bagi intern partai maupun ekstern bagi masyarakat umum. Kebijakan partai tak lepas dari platform partai, agar apa yang diperjuangkan sesuai dengan ideologi partai.

#### **b. Tahap-Tahap Perumusan Kebijakan Umum.**

Partai politik berusaha memperoleh kekuasaan melalui mekanisme pemilihan umum dengan berusaha mendapatkan dukungan massa yang banyak sehingga kader-kadernya dapat menduduki jabatan baik jabatan legislatif maupun jabatan eksekutif. Harapannya, ketika para pejabat itu membuat kebijakan untuk masyarakat maka kebijakan itu dapat dipengaruhi oleh kepentingan yang diperjuangkan oleh partai politik yang bersangkutan. Pengaruh ini ditekankan mengingat peran partai politik hanyalah sebagai pemeran tambahan serta tidak resmi dalam perumusan kebijakan. Sementara itu, wewenang formal tetap berada pada pejabat-pejabat pemerintahan, seperti anggota legislatif, kalangan eksekutif, dan lain sebagainya.

Untuk mengetahui bagaimana suatu kebijakan dirumuskan adalah sebagai berikut (Winarno, 2007):

##### 1) Perumusan masalah (*defining problem*).

Mengenali masalah dan merumuskannya merupakan langkah paling dasar dalam perumusan kebijakan. Masalah publik harus dikenali dan dirumuskan dengan baik agar dapat dihasilkan kebijakan yang baik pula. Namun demikian, pemecahan masalah memuaskan atau tidak atas

masalah-masalah tersebut tergantung pada tepat tidaknya masalah publik itu dirumuskan.

## 2) Agenda kebijakan

Tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Suatu masalah masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya dampak dari masalah publik itu besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan segera. Masalah publik yang telah masuk ke agenda akan dibahas oleh perumus kebijakan berdasarkan tingkat urgensi penyelesaiannya.

## 3) Pemilihan alternatif kebijakan

Para perumus kebijakan mempunyai beberapa alternatif pilihan kebijakan untuk menyelesaikan masalah. Pada tahap ini, perumus kebijakan akan dihadapkan pada bentrokan kepentingan antarberbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antaraktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut, misalnya antara Bupati dan DPRD Kabupaten.

## 4) Penetapan kebijakan

Setelah salah satu alternatif kebijakan diambil untuk memecahkan masalah, maka tahap paling akhir adalah menetapkan kebijakan yang telah dipilih agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

### c. Peran Serta Partai Politik dalam Perumusan Kebijakan Umum.

Partai politik merupakan sesuatu yang tak terpisahkan dalam suatu negara demokrasi. Partai politik berusaha mendapatkan kekuasaan melalui



mekanisme pemilihan umum dianggap lebih berorientasi kekuasaan saja daripada berorientasi tentang kebijakan publik. Besar maupun kecil peranannya, partai politik tetap mempunyai peran dalam perumusan kebijakan publik di mana partai politik melalui kader-kader mereka berusaha mempengaruhi esensi kebijakan itu dalam proses perumusannya (Winarno, Budi, 2007: 130).

Peran partai politik dalam mempengaruhi kebijakan tampak pula pada fungsinya sebagai agregasi kepentingan. Partai politik menyatukan berbagai aspirasi dari berbagai kelompok kepentingan untuk selanjutnya dijadikan beberapa alternatif kebijakan. Arah kebijakan dari suatu partai politik tentu mencerminkan asas partai politik yang bersangkutan, misalnya Partai Keadilan Sejahtera yang berasaskan Islam, mengusulkan agar minuman keras dilarang beredar karena merupakan hal yang dilarang dalam agama Islam.

#### **4. Manajemen Partai Keadilan Sejahtera**

##### **a. Sejarah Perkembangan Ideologi Partai Politik di Indonesia**

Partai politik muncul di Indonesia pada awal abad ke-20 sebagai kelanjutan dari organisasi-organisasi sosio-agama saat itu. Menurut Karim (Rifai, 2010:6), munculnya partai politik adalah sebagai aktualisasi pandangan tiga aliran yaitu Islam, Nasionalisme, dan Marxisme/Sosialisme.

Aliran pertama yaitu Islam, ditandai dengan berdirinya Sarekat Islam di Solo oleh H. Samanhudi, pada tahun 1911. Aliran Marxisme/Sosialisme ditandai dengan berdirinya Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 20 Mei 1920 oleh para mantan SI, Semaun dan Darsono, yang

mendapat pengaruh Marxisme. Aliran nasionalisme ditandai dengan adanya Partai Nasionalis Indonesia (PNI) oleh Ir. Soekarno, pada 4 Juli 1927. Pada zaman kolonial ini sebenarnya banyak bermunculan organisasi yang menjadi cikal bakal partai politik.

Pada zaman penjajahan Jepang yang terjadi antara tahun 1942-1945, pemerintah Jepang di Indonesia membubarkan partai politik yang ada semasa zaman kolonial. Hanya golongan Islam yang diperbolehkan membentuk organisasi sosial, Masyumi (Rifai, 2010).

Perkembangan ideologi partai selanjutnya dapat dirunut sejak keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, tentang anjuran pembentukan partai politik. Hal ini segera diikuti dengan berdirinya banyak partai baru di Indonesia seperti Partai Masyumi, Partai Indonesia Raya (Parindra), Partai Katolik, dan sebagainya. Dilihat dari segi ideologi partai, terdapat beberapa partai besar yang mempresentasikan ideologi politik yang berkembang sampai pemilu tahun 1955 (Sunarto, 2004) yaitu:

- 1) Nasionalisme, contoh: Partai Nasional Indonesia (PNI).
- 2) Islam tradisional, contoh: Nahdlatul Ulama (NU).
- 3) Sosialisme, contoh: Partai Sosialis Indonesia (PSI).
- 4) Komunisme, contoh: Partai Komunis Indonesia (PKI).

Perkembangan ideologi partai politik selanjutnya, sangat dibatasi dengan munculnya Penpres Nomor 13 Tahun 1960. Pemerintah hanya mengakui sembilan partai yaitu PNI, NU, PKI PSII, Parkindo, Partai Katolik, Perti, Pertindo, dan Murba. Selama periode demokrasi terpimpin ini, melalui nasionalisme, agama dan komunisme (nasakom) hanya PKI yang mempunyai kesempatan mengembangkan pengaruh ideologi partainya

(Sunarto, 2004). Sampai pada akhirnya, terjadi pemberontakan pada 30 September tahun 1965 oleh PKI, yang membuat PKI pada akhirnya dibubarkan pada 12 Maret tahun 1966 dan dinyatakan sebagai partai terlarang.

Pada masa orde baru terjadi penyederhanaan kehidupan kepartaian melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang partai parpol dan Golkar. Hanya ada dua parpol (PPP dan PDI) dan satu Golongan Karya di Indonesia (Sunarto, 2004). Pemilu tahun 1977 sampai tahun 1997 berjalan secara monoton yang hanya diikuti oleh dua parpol dan golongan karya. Selama periode ini pula, Golkar menjadi mesin politik pemerintah yang selalu menguasai suara mayoritas dalam pemilu.

Fokus pemerintahan orde baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pada tahun 1985 muncullah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang parpol dan Golkar. Semua organisasi politik di Indonesia menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Dengan demikian, organisasi politik tidak bisa mempunyai ciri khusus seperti PPP adalah Islam, PDI adalah nasionalisme, dan Golkar adalah kekaryaan (Rifai, 2010).

Memasuki era reformasi, banyak partai politik baru yang bermunculan. Partai politik mempunyai peranan yang sangat menonjol. Hasil pemilu tahun 1999 dianggap hasil pemilu yang demokratis kedua setelah pemilu tahun 1955. Menjelang pemilu tahun 2004, jumlah partai cenderung berkurang. Salah satu partai politik peserta pemilu tahun 2004 adalah Partai Keadilan Sejahtera. PKS muncul sebagai partai baru yang mengusung ideologi Islam yang pendiriannya terkait dengan pertumbuhan

aktivitas dakwah Islam sejak awal tahun delapan puluhan (Dhakidae, 2004).

Awal tahun delapan puluhan, berkembang gerakan-gerakan keislaman di luar negeri. Gerakan keislaman ini, di Indonesia mengambil masjid-masjid kampus sebagai basis operasional dan strukturalnya. Gejolak pemikiran keislaman dalam berbagai bidang termasuk politik mulai bermunculan. Persaudaraan (*ukhuwah*) dibangun di antara mereka sebagai alternatif cara hidup di tengah masyarakat yang cenderung semakin individualistik.

Di Indonesia, lengsernya Presiden Soeharto dirasa membuka iklim kebebasan. Pendirian partai politik yang berorientasi pada ajaran Islam perlu dilakukan guna mencapai tujuan dakwah Islam dengan cara-cara yang demokratis yang dapat diterima banyak orang (Dhakidae, 2004).

PKS muncul sebagai partai baru yang mempunyai label sebagai partai kalangan muda. PKS mengusung nilai-nilai moral dan Islam yang konsisten, bahkan cenderung kaku. Melalui pendidikan formal maupun non-formal, PKS membina kader-kader partai yang diharapkan mampu mengontrol perilaku kadernya baik yang di legislatif maupun eksekutif agar jauh dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ('Izzuddin, 2004). PKS yang dikenal tegas dalam menegakkan nilai-nilai Islam menjadi semangat baru bagi partai Islam untuk menunjukkan eksistensinya di tengah partai-partai lama yang telah mengakar kuat pengaruhnya di masyarakat selama puluhan tahun.

#### **b. Visi Partai Keadilan Sejahtera**

Visi adalah pandangan jauh ke depan. Menurut Gaffar, visi adalah daya pandang jauh ke depan, mendalam, dan luas yang merupakan daya

pikir abstrak yang memiliki kekuatan dan dapat menerobos batas fisik, waktu, dan tempat (Danim, 2008: 71). Pernyataan visi menjawab pertanyaan “apa yang ingin kita capai”. Visi juga merupakan motivator dalam suatu organisasi.

Menurut Etzioni (Handoko, 2001), visi organisasi didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang diinginkan, di mana organisasi bermaksud untuk merealisasikan dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang di mana organisasi sebagai kolektifitas mencoba untuk menimbulkannya. Jadi, terdapat dua unsur penting, yaitu hasil akhir yang diinginkan di waktu yang akan datang dan usaha-usaha yang dilakukan sekarang. Hal ini dapat dirumuskan dalam tujuan umum, tujuan akhir, dan tujuan antara organisasi.

Partai Keadilan Sejahtera adalah sebuah partai Islam di Indonesia yang dikenal sangat konsisten atau kaku Islamnya. PKS berusaha memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam wilayah politik sehingga setiap muslim dapat menjalankan kehidupannya secara lebih Islami dengan tidak menjadikan masyarakat non muslim menjadi terganggu.

Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai yang berbasis agama Islam mempunyai peran dalam memperjuangkan kepentingan kelompoknya maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan, bahwa agama dan politik tak bisa dipisahkan. Dalam dakwah Islam sendiri mencakup seluruh aspek kehidupan, sehingga tidak terkecuali untuk melakukan dakwah melalui partai politik.

Dalam suatu organisasi, visi adalah suatu yang tidak dapat dipisahkan dari struktur organisasi atau ruh organisasi itu. Begitu pula

dengan PKS sebagai suatu organisasi politik juga mempunyai visi. Visi Indonesia yang dicita-citakan PKS adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat (MPP PKS, 2007).

Masyarakat madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju berbasiskan pada nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan, menghormati pluralitas, bersikap terbuka, dan demokratis, dan bergotong royong menjaga kedaulatan negara (MPP PKS, 2007). Masyarakat madani dapat juga diartikan sebagai masyarakat yang menunjukkan kepeduliannya terhadap negara tidak selalu melalui partai politik, tetapi bisa melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa. Dengan kata lain, masyarakat madani adalah masyarakat di luar negara. Hal ini berbeda dengan masyarakat politik yang menunjukkan kepeduliannya melalui partai politik yang disebut juga sebagai negara itu sendiri.

Adil adalah kondisi di mana masyarakat dan kualitas kehidupan baik di bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial ditempatkan secara proporsional (MPP PKS, 2007).

Sejahtera adalah keseimbangan antara kebutuhan dan sumber pemenuhannya. Keseimbangan hidup yang merupakan hasil dari kemampuan seseorang memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya (akal, ruh, dan jasad) (MPP PKS, 2007).

Bermartabat adalah bangsa Indonesia mampu menempatkan dirinya secara individu maupun sosial sejajar dengan bangsa lain di dunia, mampu menampilkan dirinya di bidang sosial, politik, maupun budaya, sehingga

memunculkan penghormatan dan kekaguman dari bangsa lain (MPP PKS, 2007).

### c. Aktualisasi Visi Sejahtera

Aktualisasi dalam Cambridge *dictionary* berasal dari kata *actualization* [noun] yang berarti perwujudan atau pelaksanaan. Apabila definisi ini kita dikaitkan dalam dunia perjuangan partai politik, maka hal ini menjadi tuntutan untuk mewujudkan visi partai politik ke dunia realita.

Aktualisasi merupakan fungsi yang fundamental dalam suatu manajemen. Proses perencanaan dan pengorganisasian memang merupakan fungsi vital, tetapi tidak akan dihasilkan *output* jika tidak ditindaklanjuti untuk melakukan kegiatan tertentu dalam rangka mencapai sasaran organisasi (Sutomo, 2007).

Berbicara mengenai tuntutan aktualisasi, tidak akan lepas dari adanya kesadaran untuk saling mengisi kebutuhan bersama. Aktualisasi akan melibatkan interaksi dengan masyarakat atau lingkungan sosial dalam mewujudkan visi dan misi yang dicita-citakan. Oleh karena itu, para anggota partai politik baik yang merupakan kader partai ataupun simpatisan partai harus dilatih untuk tahu sedikit demi sedikit mengenai kebutuhan masyarakat saat ini dan cara yang paling relevan untuk mewujudkan visi partai (Firmanzah, 2008).

Tidak jarang cara atau pendekatan atau metode yang digunakan untuk mengaktualisasikan visi partai pada akhirnya terbentur pada kebutuhan materi. Hal ini wajar, karena sebaik apapun metode aktualisasi

yang dilakukan tanpa diimbangi materi yang kuat, maka target dan tujuan tidak tersampaikan dengan baik.

Aktualisasi membutuhkan waktu yang relatif lama, tidak bisa *instant*. Aktualisasi visi partai perlu untuk diimbangi dengan pemikiran yang rasional sehingga tidak terkesan menjadi mimpi belaka.

Visi Indonesia yang dicita-citakan Partai Keadilan Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Visi sejahtera di sini mengarahkan pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin manusia di mana terjadi keseimbangan antara kebutuhan dan sumber pemenuhannya. Kesejahteraan dalam artian yang sejati adalah keseimbangan (*tawazun*) hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya (ruh, akal, dan jasad) (MPP PKS, 2007: iii).

Visi Partai Keadilan Sejahtera agar dapat terealisasi maka dirumuskan dalam beberapa program kerja partai yang dapat dianggap sebagai tujuan antara. Program kerja ini dapat digunakan sebagai identifikasi apakah visi partai atau tujuan jangka panjang partai tercapai sesuai tujuan atau tidak.

#### **d. Kiprah Partai Keadilan Sejahtera**

PKS memang baru bisa mengirim beberapa orang di lembaga perwakilan rakyat, namun kiprahnya mampu memberikan pencerahan dalam pembuatan kebijakan. Paling tidak, PKS mampu untuk mengkritisi kebijakan yang merugikan rakyat yang sering dilakukan baik oleh legislatif, eksekutif maupun yudikatif. PKS juga mampu memberikan keteladanan



untuk menjadi pejabat yang amanah yang tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri.

Solikhin dalam buku 16 Profil PKS Solusi Masalah Bangsa menjelaskan, bahwa Partai Keadilan Sejahtera telah melakukan beberapa kiprah nyata dalam perjuangannya antara lain:

1) Pos kemanusiaan

Kabupaten Larantuka Flores Timur pada tahun 2003 sempat terkena bencana alam banjir dan tanah longsor. Mereka mengirimkan Pos Penanggulangan Bencana untuk membantu memberikan pengobatan umum gratis, pembagian sembako dan baju layak pakai kepada korban bencana. Kegiatan serupa juga pernah dilakukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus dengan mengirimkan beberapa relawan di Magelang untuk membantu korban bencana letusan gunung Merapi.

2) Konsisten tidak untuk *money politic*.

Salah seorang anggota DPRD Kalimantan Timur dari fraksi PKS membeberkan kepada pers bahwa DPRD menerima uang 25 juta Rupiah untuk bersikap menerima laporan pertanggungjawaban kinerja Gubernur.

3) Melawan korupsi.

Yuswar Hidayatullah, merupakan anggota DPRD Sumatra Selatan yang menolak dan tidak turut bertanggungjawab atas penyusunan APBD itu, karena adanya indikasi tindakan memperkaya diri sendiri yang tampak pada biaya operasional dan lain-lain.

4) Peduli Pendidikan

DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus melalui kader-kadernya memberikan bimbingan belajar kepada siswa SD dan sosialisasi di kalangan ibu-ibu tentang pentingnya pendidikan.

Partai Keadilan Sejahtera mempunyai beberapa program kerja yang secara umum hampir sama di semua regional di Indonesia, antara lain:

- 1) Bakti Sosial berupa kegiatan pengobatan gratis, tujuannya memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat sehingga kesejahteraan kesehatan masyarakat menjadi lebih baik.
- 2) Pasar murah yang menyediakan bahan-bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sehingga terpenuhi kebutuhan masyarakat.
- 3) Pos Wanita Keadilan (PWK) untuk pintu rekrutmen, pendekatan, pelayanan masyarakat dan pencitraan partai dalam rangka kemenangan pemilu.

## **B. Kerangka Berpikir**

Partai Keadilan Sejahtera sebagai suatu partai politik mempunyai visi partai politik. Visi adalah pernyataan mengenai kondisi dan situasi masyarakat ideal yang ingin diciptakan oleh partai politik. Visi bagi suatu partai politik sangat penting karena visi akan memberi gambaran kepada masyarakat dan kepastian tentang perjuangan partai. Kejelasan visi akan membantu dalam penyusunan tujuan partai maupun strategi untuk mencapainya.

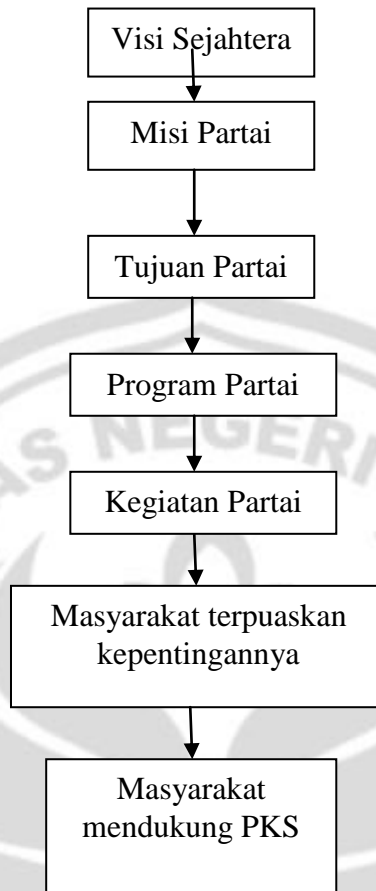
Visi sejahtera, merupakan visi khusus dari Partai Keadilan Sejahtera. Sejahtera dimaknai sebagai suatu keadaan di mana partai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk anggotanya. Aktualisasi visi oleh partai politik selain sebagai wujud perjuangan partai untuk memuaskan pihak-pihak yang

harus diperhatikan kepentingannya juga dalam upaya memenangkan kompetisi antar partai politik, sehingga memperoleh dukungan dan kepuasan sebesar-besarnya bagi pendukungnya.

Partai politik memerlukan strategi dalam usahanya memperoleh dukungan dari masyarakat. Partai politik akan mencari cara agar strategi yang digunakan membedakannya dengan partai pesaing, menunjukkan bahwa partainya yang paling kompeten untuk dipercaya menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat.

Program kerja partai dalam pelaksanaannya membutuhkan strategi agar apa yang telah dirumuskan sebagai tujuan partai dapat tercapai secara efektif dan efisien. Aktualisasi visi tentunya tidak mudah dalam pelaksanaannya. Ada faktor-faktor yang menghambat dalam aktualisasi visi tersebut. Namun demikian, segala hal yang dilakukan PKS tidak lepas dari AD/ART yang telah ditetapkan. Hasil yang mereka inginkan atas sesuatu yang mereka perjuangkan, tentunya untuk menciptakan keadaan masyarakat yang lebih sejahtera sebagaimana tercantum dalam AD/ART PKS. Terpenuhinya kepentingan masyarakat Kudus oleh DPD PKS Kabupaten Kudus diharapkan mampu meningkatkan dukungan masyarakat bagi PKS.

Penjelasan dalam alinea di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 3. Kerangka berpikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana data hasil penelitian ini berupa data deskriptif yang tidak dihitung menggunakan rumus-rumus statistik.

Penggunaan metode kualitatif ini adalah untuk meneliti permasalahan mengenai bagaimana aktualisasi visi sejahtera DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat yang akan dideskripsikan melalui kalimat-kalimat. Visi sejahtera DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus ini tak lepas dari platform kebijakan pembangunan Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Pengumpulan data berdasarkan metode kualitatif ini dilakukan melalui teknik wawancara kepada informan, observasi, dan dokumentasi.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera yang beralamat di Jalan Kyai Telingsing No.95A, Desa Sunggingan, Kudus dan di rumah beberapa informan (lampiran).

#### **C. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana aktualisasi visi sejahtera DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus.

2. Faktor-faktor yang menghambat dan faktor-faktor yang mendukung aktualisasi visi sejahtera PKS DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus.

#### **D. Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Data Primer**

Data primer yang diperoleh adalah berupa data hasil dari wawancara dengan informan yang mengetahui persis masalah yang dibahas. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera masa bakti 2006-2010 dan anggota fraksi PKS DPRD Kabupaten Kudus. Informan biasa adalah kader PKS dan simpatisan PKS atau masyarakat Kudus.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yang diperoleh berasal dari sumber-sumber yang dimiliki DPD PKS Kabupaten Kudus. Data sekunder yang digunakan adalah AD/ART PKS, platform kebijakan pembangunan PKS, falsafah dasar PKS, dan buku profil PKS.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai metode sebagai berikut.

##### **1. Metode Wawancara**

Wawancara ini ditujukan kepada beberapa informan yang dianggap mengetahui masalah yang sedang diteliti, misalnya sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera masa bakti 2006-

2010 dan anggota fraksi PKS di DPRD Kabupaten Kudus. Informan biasa adalah kader PKS dan simpatisan PKS atau masyarakat Kudus.

Teknik wawancara ini dipilih sebagai alat pengumpulan data karena lebih cepat dalam proses mengumpulkan data dan lebih faktual serta bisa ditanyakan langsung kepada informan apabila terjadi bias informasi.

## 2. Metode Observasi

Observasi dalam penelitian ini berupa pengamatan langsung ke daerah yang pernah dijadikan lokasi pelaksanaan kegiatan sosial DPD PKS Kabupaten Kudus.

Hasil observasi dapat digunakan sebagai pembandingan antara hasil wawancara yang dilakukan dengan hasil pengamatan apakah ada kesesuaian atau tidak.

## 3. Metode Dokumentasi

Analisis dokumen–dokumen yang digunakan adalah AD/ART PKS, platform kebijakan pembangunan PKS, falsafah PKS, dan buku profil PKS.

## **F. Keabsahan Data**

Untuk mendapatkan validitas atau keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data. Teknik ini akan mengecek derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dengan menggunakan sumber pembandingan yang lain di luar data itu. Hal ini dilakukan agar ditemukan kesamaan data.

Triangulasi dengan sumber data lain dapat ditempuh dengan cara :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2002: 178).

## **G. Analisis Data**

Dalam menganalisis data yang terkumpul baik dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi penulis mencoba menginterpretasikan dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam metode kualitatif analisis data dilakukan bersamaan dengan berlangsungnya pengumpulan data. Tahap-tahap analisis data yaitu :

### **1. Pengumpulan data**

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

### **2. Reduksi data**

Reduksi data yaitu proses pemilihan dan pemusatan data pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan data sedemikian rupa, sehingga dapat diambil simpulan yang tepat dan valid.

### **3. Penyajian data**

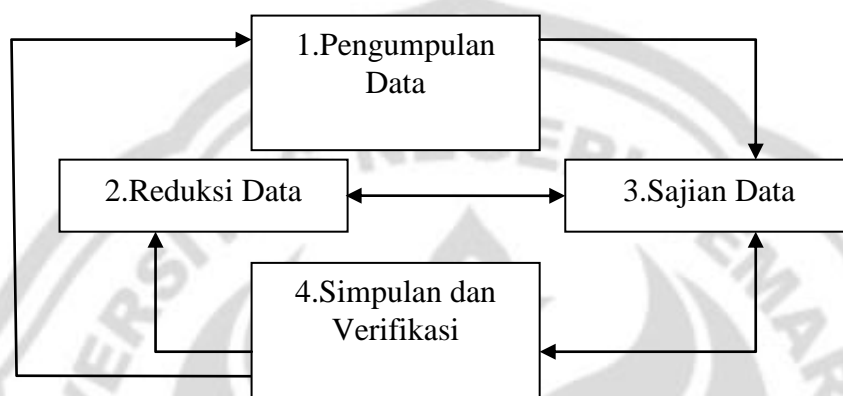
Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan penarikan simpulan dan pengambilan tindakan.

### **4. Menarik simpulan dan verifikasi**



Meninjau ulang pada hasil di lapangan dengan sumber data lain, sehingga data yang disajikan dapat diuji kebenarannya, kekokohan, dan kecocokannya.

Menurut Miles dan Huberman (1992), tahapan analisis data kualitatif di atas dapat dilihat pada bagan berikut ini.



Bagan 4. Tahapan Analisis Data

## H. Prosedur Penelitian

Dalam penelitian, tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut.

### 1. Tahap rancangan penelitian

Peneliti membuat rancangan penelitian atau proposal penelitian yang akan digunakan untuk meneliti di lokasi yang telah ditentukan. Proposal penelitian akan memuat latar belakang penelitian, landasan teori, dan metode yang akan digunakan dalam penelitian.

### 2. Tahap Persiapan Penelitian

Persiapan penelitian ini berupa mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, misalnya survei pendahuluan dan lain-lain.

### 3. Tahap pelaksanaan penelitian

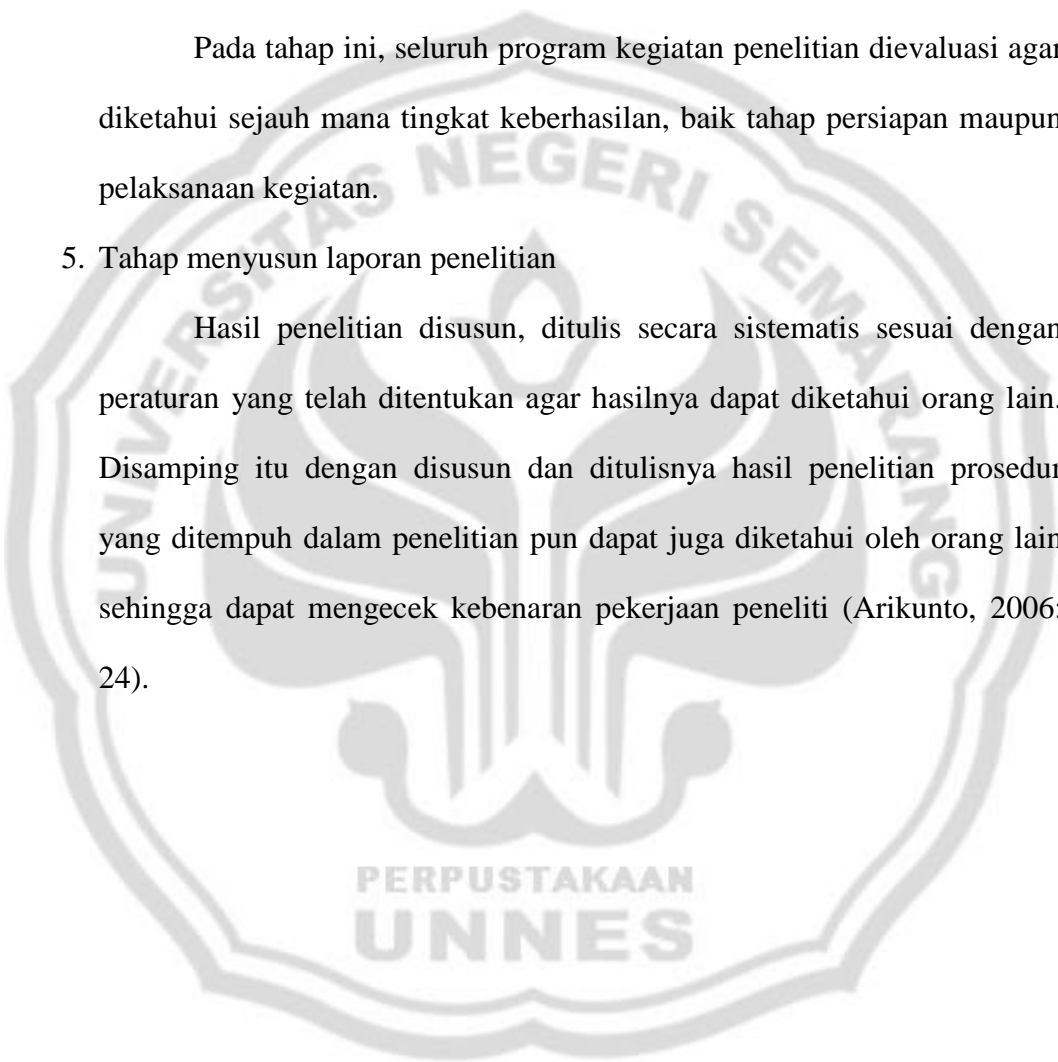
Peneliti akan mengumpulkan data-data yang diperlukan baik data primer maupun data sekunder dari responden, informan, maupun dokumen yang akan digunakan untuk menjelaskan objek yang menjadi fokus penelitian.

#### 4. Tahap Evaluasi

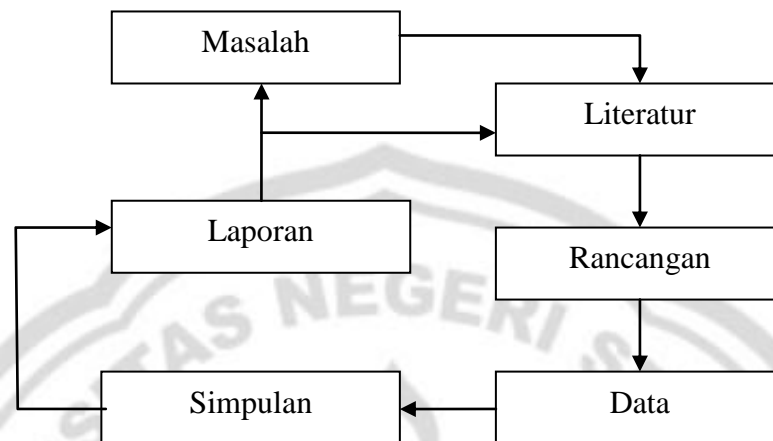
Pada tahap ini, seluruh program kegiatan penelitian dievaluasi agar diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan, baik tahap persiapan maupun pelaksanaan kegiatan.

#### 5. Tahap menyusun laporan penelitian

Hasil penelitian disusun, ditulis secara sistematis sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan agar hasilnya dapat diketahui orang lain. Disamping itu dengan disusun dan ditulisnya hasil penelitian prosedur yang ditempuh dalam penelitian pun dapat juga diketahui oleh orang lain sehingga dapat mengecek kebenaran pekerjaan peneliti (Arikunto, 2006: 24).



Tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan dapat digambarkan sebagai berikut.



Bagan 5. Tahap-Tahap Penelitian



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus**

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai baru sebagai pengganti dari Partai Keadilan yang gagal memenuhi ambang batas perolehan minimal suara pemilu tahun 1999 sebesar 3%.

Nama baru bagi PKS bukanlah suatu masalah. Bagi PKS, nama partai hanyalah sekedar nama tetapi yang paling hakiki adalah PKS tetap mampu berdakwah demi perjuangan umat dan melayani masyarakat agar menjadi lebih baik. Berdakwah melalui politik adalah suatu ikhtiar yang menjadi tuntutan saat ini untuk mewujudkan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat sesuai yang PKS cita-citakan.

Berdakwah bagi PKS adalah mentransformasikan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Melalui objektivikasi, nilai-nilai Islam ditransformasikan dari pandangan personal PKS yang subjektif ke dalam pandangan yang objektif yang ada di masyarakat, sehingga nilai-nilai Islam ini bisa dinikmati oleh semua orang sebagaimana prinsip dasar Islam sebagai rahmat bagi semesta. Oleh karena itu, mereka menyatakan diri sebagai partai dakwah.

Sementara itu, politik berguna untuk membuka kemungkinan agar pemerintah mengadopsi prinsip-prinsip syariat agama Islam sebagai kebijakan publik.

PKS sebagai partai politik, mempunyai kepengurusan dari tingkat pusat sampai dengan ranting untuk mengelola partai dengan baik. Di tingkat

kabupaten, kepengurusan PKS berada di Dewan Pengurus Daerah (DPD). Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus beralamat di Jalan Kyai Telingsing Nomor 95A, Sunggingan, Kudus. Kantor sekretariatnya dibangun di atas tanah seluas 10x12 m. Kantor sekretariat ini juga sekaligus sebagai kantor sekretariat Dewan Pengurus Cabang Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

Untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat dalam suasana Islam dan sebagai langkah konkret aktualisasi visi sejahtera PKS, DPD PKS Kabupaten Kudus melaksanakan berbagai kegiatan sosial, pendidikan, pelatihan keterampilan, maupun dakwah.

Kuatnya nuansa Islam dalam PKS, misalnya sangat reaktif terhadap penindasan umat muslim di dunia sempat menimbulkan kesan bahwa partai ini sangat eksklusif dan radikal. Tetapi, melalui keteladanan moral yang baik oleh tiap kadernya, kesan ini mampu ditepis.

Dalam kurun waktu 2006-2010, DPD PKS Kabupaten Kudus mempunyai agenda untuk menjalin hubungan dengan calon pemilih maupun konstituennya melalui kegiatan sosial, misalnya pasar murah, donor darah, pelayanan kesehatan, pos wanita keadilan, dan beasiswa. Kegiatan-kegiatan sosial ini merupakan program-program kerja partai sebagaimana yang diinstruksikan atau telah ditetapkan dari Dewan Pengurus Pusat. Kegiatan-kegiatan sosial itu dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan tidak hanya bagi anggota PKS tetapi juga bagi masyarakat umum serta sebagai cara untuk mengenalkan PKS di masyarakat. Dari beberapa program yang dilaksanakan, program pemberdayaan perempuan adalah program yang paling diunggulkan karena yang paling intensif dalam pelaksanaanya.

Program kerja PKS bertujuan sebagai langkah aktualisasi visi sejahtera dan sebagai cara untuk merekrut anggota dan mengenalkan PKS di masyarakat. Harapannya, masyarakat akan tertarik dengan PKS.

“Aktivitas politik kami memang harapannya agar masyarakat Kudus memilih PKS saat pemilu, tetapi hal ini bukan berarti orientasi PKS hanya kemenangan pemilu saja. Aktivitas dakwah kami yang paling kami utamakan untuk membentuk moral yang baik dalam diri anggota. Syukur jika dakwah kami meluas di kalangan masyarakat. Dakwah adalah jiwa kami, maksudnya dengan dakwah kami harapkan nilai-nilai Islam dapat kami tanamkan dalam diri manusia, sehingga manusia akan senantiasa berada di jalan Islam. Terkait dengan visi sejahtera, jika manusia mengamalkan Islam, tentu kesejahteraan akan lebih terasa, tidak terpaku pada materi saja” (wawancara dengan dr. Giri, ketua DPD PKS Kudus tahun 2006-2010 pada 16 Maret 2011).

Kiprah PKS di DPRD Kabupaten Kudus dalam rangka perjuangan partai ditunjukkan dengan sikap kritis anggota fraksi PKS di DPRD dalam menyikapi berbagai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan ke DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Melalui kritikan mereka, PKS berusaha mencegah adanya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau terjadinya kebijakan yang tidak pro rakyat.

Kader PKS di DPRD Kabupaten Kudus sampai saat ini belum pernah berhasil membuat kebijakan publik berasaskan Islam yang murni dari ide FPKS karena PKS di Kudus baru sedikit mengirimkan wakil-wakilnya di lembaga perwakilan rakyat. Jadi, kader-kader PKS di DPRD Kabupaten Kudus hanya mampu memberikan pandangan fraksinya untuk mempengaruhi arah ranperda yang sedang dibahas.

#### **a. Visi Partai Keadilan Sejahtera**

Dalam suatu organisasi, visi adalah suatu yang tidak dapat dipisahkan dari struktur organisasi atau ruh organisasi itu. Begitu pula dengan PKS sebagai suatu organisasi politik juga mempunyai visi. Visi merupakan cita-cita dari suatu organisasi yang ingin diwujudkan. Visi Indonesia yang dicita-citakan PKS adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat (MPP PKS, 2007).

#### **b. Misi Partai Keadilan Sejahtera**

Misi adalah alasan yang menjelaskan mengapa suatu organisasi itu harus ada. Sejalan dengan visi PKS, dalam Platform Kebijakan Pembangunan PKS disebutkan bahwa misi PKS adalah:

- 1) Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi.
- 2) Mendorong penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya dan layak bagi manusia untuk menghapuskan kemiskinan dan mendorong pemerataan pendapatan dan kesejahteraan melalui program pemberdayaan masyarakat miskin dan sektor informal.
- 3) Menuju pendidikan berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Terciptanya masyarakat sejahtera, melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat mewadahi dan membantu proses pembangunan yang kontinyu.

### **c. Tujuan Partai Keadilan Sejahtera**

PKS dalam Anggaran Dasar pasal 5 mencantumkan bahwa tujuan partai ini adalah terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD Republik Indonesia 1945 dan terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridldai Allah SWT, dalam NKRI.

Masyarakat madani adalah masyarakat yang berperadaban yang berbasiskan pada nilai, hukum, moral, dan keimanan serta menghormati pluralitas, bersikap terbuka, demokratis, dan bergotong royong. Adil adalah kondisi entitas dan kualitas kehidupan ditempatkan secara proporsional dan seimbang. Sejahtera adalah pemenuhan kebutuhan lahir dan batin manusia seimbang dengan sumber pemenuhannya. Bermartabat adalah menempatkan bangsa Indonesia secara individu dan sosial sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia (MPP PKS, 2008).

### **d. Nama, Lambang, dan Landasan Filosofis Partai Keadilan Sejahtera**

Dalam kehidupan politik, partai politik bagaikan suatu produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Agar masyarakat memberikan perhatian kepada produk itu maka partai politik harus mempunyai kemasan yang baik, misalnya nama dan lambang partai.

Dalam platform kebijakan pembangunan Partai Keadilan Sejahtera, keadilan didefinisikan sebagai kondisi di mana entitas dan kualitas kehidupan baik pembangunan politik, ekonomi, hukum, dan sosial kemasyarakatan ditempatkan secara proporsional dalam ukuran yang pas dan seimbang, tidak melampaui batas. Sementara itu, sejahtera



diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan lahir dan batin manusia seimbang dengan sumber pemenuhannya.

Makna lambang Partai Keadilan Sejahtera adalah menegakkan nilai-nilai keadilan berdasarkan pada kebenaran, persaudaraan dan persatuan menuju kegemilangan dan kejayaan umat dan bangsa. Lambang Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai berikut.



Lambang Partai Keadilan Sejahtera di atas dapat ditafsirkan sebagai berikut:

	<b>Gambar</b>	<b>Makna</b>
Bentuk	Kotak persegi empat	Kesetaraan, keteraturan, keserasian.
	Kotak hitam	Pusat peradaban dunia Islam yakni Ka'bah..
	Bulan sabit	Lambang Kemenangan Islam, dimensi waktu, keindahan, kebahagiaan, pencerahan, kesinambungan sejarah.

	Untaian 17 butir padi pada tangkai tegak lurus	Adil, ukhuwah, istiqomah, berani, tegas dalam mewujudkan kesejahteraan, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas.
Warna	Putih	Suci, mulia, dan bersih
	Hitam	Aspiratif, akomodatif, dan kepastian
	Kuning emas	Kecemerlangan, kebahagiaan, dan kejayaan

Landasan filosofis berdirinya PKS adalah keyakinan bahwa Islam adalah agama yang meliputi berbagai bidang kehidupan termasuk politik. Partai politik dianggap sebagai media dakwah yang menjadi tuntutan saat ini demi perbaikan bangsa dengan berperan untuk mengarahkan kebijakan umum. Sebagai media dakwah, PKS ingin lebih menanamkan nilai-nilai Islam.

#### e. Struktur Organisasi dan Program DPD PKS Kabupaten Kudus

Struktur organisasi PKS di tingkat daerah adalah Majelis Pertimbangan Daerah, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Syari'ah Daerah yang berkedudukan di Kota atau Kabupaten. Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Kudus yaitu, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang Wilayah dan Kelembagaan, Bidang Kewanitaan, Bidang Kesejahteraan

Rakyat, Bidang Ekonomi dan Keuangan, Bidang Kepemudaan serta Bapilu dan Humas. Susunan Pengurus Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus periode 2006-2010 sebagai berikut.

Ketua : dr. H. Bahana Sugiri.

Sekretaris : Aris Rahargiyanto, A.Md.

Bendahara : Sugiyono.

#### Bidang-bidang

1) Ketua Bidang Pembinaan Kader: Setia Budi Wibowo, S.Ag., M.M.

Bidang ini bertanggung jawab terhadap perekrutan dan pembinaan kader PKS. Kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang ini adalah *halaqah* atau kajian rutin, Liqa', dan sebagainya.

2) Ketua Bidang Wilayah dan Kelembagaan: Tri Mulyono

Bidang ini bertanggung jawab dalam mengkoordinasi dan memantau perkembangan struktur kelembagaan di wilayahnya, misalnya mengetahui perkembangan jumlah Depera dan DPC untuk dilaporkan ke DPD.

3) Ketua Bidang Kewanitaan: Arie Widiani R, A.Md.

Bidang ini bertanggung jawab terhadap masalah yang menyangkut kesejahteraan wanita. Program utama bidang ini adalah Pos Wanita Keadilan (PWK) yang mengkoordinasi pelaksanaan program lain, yaitu Gerakan Sayang Ibu (GSI), pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu, pendidikan politik bagi wanita, penyuluhan kesehatan, kajian agama Islam, dan penyuluhan pendidikan.

4) Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat: M. Sugeng.

Bidang ini bertanggung jawab terhadap masalah kesejahteraan masyarakat. Bidang ini melaksanakan program Pelayanan Rakyat Adil dan Sejahtera (PRAS)/ pelayanan kesehatan dan pasar murah.

5) Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan: Sayyid Yunanta,S.T.

Bidang ini bertanggung jawab di bidang ekonomi dan keuangan. Bidang ini dapat membantu masyarakat dalam usaha untuk mendapatkan dana dari pemerintah dengan mengajukan proposal untuk kegiatan tertentu, misalnya meminta bantuan sapi atau permohonan bantuan dana untuk pembangunan masjid.

6) Ketua Bidang Kepemudaan: Nasrullah, S.T.

Bidang ini bertanggung jawab dalam mengembangkan jiwa sosial para anggota melalui kegiatan kepramukaan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang ini adalah *Mukhoyyam* dan donor darah.

Badan-Badan

1) Bapilu: Syu'aibul Huda A.Md.

2) Humas: Saifudin Kamal

Sementara itu, untuk struktur kepengurusan di cabang sudah 100 persen mempunyai Dewan Pengurus Cabang di sembilan kecamatan yang tersebar di Kabupaten Kudus yaitu DPC PKS Undaan, Jati, Kota, Gebog, Dawe, Bae, Jekulo, Mejobo dan Kaliwungu.

**f.Sarana dan Prasarana**

Berdasarkan pengamatan langsung dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh DPD PKS Kabupaten Kudus yaitu:

- 1) Kantor Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera yang terdiri dari :
  - a) Ruang Rapat
  - b) Ruang Sekretariat
  - c) Ruang Tamu
  - d) Ruang Serba guna
  - e) Tempat parkir
  - f) Toilet.
  - g) Tempat tinggal penjaga.
- 2) Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempunyai tiga set komputer, 2 buah komputer dalam keadaan rusak dan 1 buah komputer dalam keadaan baik.

#### **g. Pengurus dan Anggota**

Dari data wawancara dengan Sekretaris DPD PKS Kabupaten Kudus dan dokumen struktur organisasi DPD PKS Kabupaten Kudus, PKS di Kudus mempunyai kurang lebih 500 anggota atau kader yang tersebar di sejumlah daerah di Kudus.

“Di Kudus, tidak ada daerah yang benar-benar basis massa PKS, semua daerah terbilang sama saja. Jumlah kader PKS ini terhitung masih sangat sedikit, kurang lebih lima ratusan anggota. Oleh karena itu, kegiatan kajian Islam untuk merekrut anggota dilaksanakan secara rutin. Untuk jumlah pengurus di DPD PKS Kabupaten Kudus hanya 20 orang. Sementara, kader-kader yang lain aktif di cabang atau ranting masing-masing. Anggota akan berkumpul semua hanya pada kegiatan tertentu, misalnya peringatan hari lahir PKS. Hal ini disebabkan karena kesibukan masing-masing anggota, tetapi menjelang pemilu anggota yang aktif lebih banyak tentunya. Kader-kader PKS di Kudus berasal dari beragam profesi dan pendidikan. Ada yang berprofesi dokter, guru, pegawai perusahaan, pedagang sampai dengan mahasiswa.

Dari segi pendidikan, jarang dari mereka yang mempunyai latar pendidikan politik. Oleh karena itu, untuk membekali kader dengan pengetahuan politik diadakan pembinaan rutin di PKS dalam bidang politik dan Islam” (wawancara dengan Pak Aris, Sekretaris DPD PKS Kabupaten Kudus periode 2006-2010 pada 10 Februari 2011).

## **2. Aktualisasi Visi Sejahtera PKS DPD PKS Kabupaten Kudus**

DPD PKS Kabupaten Kudus sebagai bagian dari pelaksana visi sejahtera PKS pada periode 2006-2010 melaksanakan beberapa program kerja partai sebagai berikut.

### **a. Pelayanan Rakyat Adil Sejahtera (PRAS)**

PRAS merupakan nama lain dari kegiatan bakti sosial yang selama ini secara berkala dilaksanakan oleh DPC PKS di Kudus. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Latar belakang dilaksanakannya kegiatan pelayanan kesehatan karena pada saat itu masyarakat Kudus, kalangan ekonomi lemah khususnya, memang membutuhkan pelayanan kesehatan yang murah. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kudus pada saat itu dipimpin oleh Bupati Tamzil belum memfasilitasi pelayanan kesehatan gratis. Oleh karena itu, PKS mengadakan kegiatan pelayanan kesehatan murah yang dapat dijangkau oleh masyarakat, walaupun pelayanan kesehatan ini hanya melayani untuk pemeriksaan penyakit ringan saja, misalnya demam dan batuk. Selain sebagai bentuk pengenalan PKS kepada masyarakat, pelayanan ini juga sebagai wujud aktualisasi visi sejahtera PKS.

Saat ini, Kudus yang dipimpin oleh Bupati Musthofa telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas se-Kabupaten Kudus dan jaminan kesehatan miskin di RSUD Kudus, sehingga kegiatan PRAS saat ini sudah tidak relevan untuk dilaksanakan lagi.

Salah satu penyelenggara PRAS yaitu DPC PKS Bae yang bekerja sama dengan DPD PKS Kudus bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Kegiatan ini pernah dilaksanakan di Dusun Delingo, Desa Peganjaran, Kudus pada tanggal 22 April 2007. Pada kesempatan hari itu, kegiatan dihadiri oleh Ketua Bidang Kesra DPD PKS Kudus dan Drs. Parjono selaku anggota DPRD Kudus serta sekitar 7 orang pengurus DPC PKS Bae.

Pada kegiatan ini, ketua DPD PKS Kudus yang juga berprofesi sebagai dokter turut membantu pemeriksaan kesehatan masyarakat. Obat-obatan yang sederhana seperti antibiotik, parasetamol, bedak gatal dan beberapa obat generik lainnya disediakan oleh PKS. Obat-obatan ini diperoleh melalui pengurus DPD PKS Kudus yang berprofesi sebagai dokter. PKS hanya memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 265.000,00 yang berasal dari kas iuran wajib DPD PKS Kudus untuk pembelian obat tersebut, sementara yang menangani pembelian adalah dokter tersebut.

Kegiatan ini memberikan pelayanan kesehatan tidak secara murni gratis kepada masyarakat karena pihak panitia mengharapkan masyarakat yang berobat menyalurkan infaq Rp. 1.000,00 atau sukarela jumlahnya untuk pengadaan obat-obatan yang akan digunakan pada pelayanan kesehatan berikutnya.

Sosialisasi kegiatan ini dilakukan dengan cara *door to door* yang sekaligus untuk mendata siapa yang kiranya memang membutuhkan bantuan kesehatan karena pasien yang akan dilayani terbatas hanya 50 orang saja.

Pelayanan kesehatan ini didukung oleh 1 orang dokter dari pihak kader PKS dan 10 orang perawat kesehatan. Biaya untuk dokter dan perawat semuanya gratis karena dokter berasal dari kader PKS sendiri dan perawat adalah simpatisan yang sukarela membantu atas permintaan bantuan oleh PKS.

Pelayanan ini juga memfasilitasi layanan ruqyah bagi masyarakat yang ingin diruqyah. Ruqyah dilaksanakan oleh ustadz yang diundang oleh pihak PKS yaitu ustadz Achmad Achid, Lc dari pengobatan alternatif El-Iman. Tidak dikeluarkan biaya untuk menghadirkan layanan ini karena secara sukarela beliau hadir, sekaligus sebagai media mengenalkan pengobatan alternatif El-Iman kepada masyarakat Kudus. Sekitar 50 pasien terdaftar oleh Depera Pegunungan untuk berobat. Pasien diberikan *snack* sambil menyaksikan pemutaran film dokumenter kiprah PKS.

#### b. Pasar Murah

Kegiatan pasar murah merupakan program yang dikoordinasi oleh DPD PKS Kabupaten Kudus dan sebagai pihak pelaksana adalah DPC di kecamatan-kecamatan yang ada di Kudus secara bergantian.

DPD PKS Kabupaten Kudus bekerjasama dengan DPC PKS Jati yang berperan sebagai pelaksana lapangan pernah menyelenggarakan



kegiatan pasar murah di kantor Depera Pasuruhan Lor pada 16 Oktober 2006.

“Dalam kegiatan ini dijual beberapa barang sembako, yaitu beras 5 kuintal dengan harga Rp. 3.000,00/kg, gula 3 kuintal dengan harga Rp. 4.000,00/kg dan minyak 2 kuintal dengan harga Rp. 6.000,00/kg. Harga barang-barang yang dijual dan di pasaran terpaut antara Rp 500,00 sampai dengan Rp 1.000,00. Barang-barang yang dijual dibeli di toko sembako grosir, sehingga diperoleh barang-barang sembako dengan harga grosir yang lebih murah yang tentunya akan menghemat pengeluaran. Selain sembako juga dijual sejumlah pakaian bekas layak pakai dengan harga yang cukup terjangkau dibandingkan dengan membeli di mall, misalnya untuk satu potong kemeja wanita jika kita membeli di pasar atau mall dengan harga Rp 50.000,00 maka di pasar murah ini dijual dengan harga Rp 20.000,00. Baju ini diperoleh dari para kader yang menyumbangkan pakaiannya. Dua puluh baju yang terkumpul terjual semua pada kegiatan ini” (wawancara dengan Bu Arie, Ketua bidang kewanitaan DPD PKS Kudus tahun 2006-2010 pada 18 April 2011).

Kegiatan ini sama sekali tidak mengharapkan akan menghasilkan laba dan memang tidak ada labanya, justru dari pihak PKS memberikan sejumlah uang sebagai subsidi atas harga barang yang dijual sehingga dapat diperoleh harga jual yang lebih murah dari harga eceran di pasar.

Sosialisasi pelaksanaan kegiatan ini dengan cara memasang spanduk di tempat yang akan dijadikan tempat pasar murah dan juga menempel selebaran di sekitar lokasi. Sekitar 20 orang kader PKS dan 100 orang warga memeriahkan kegiatan ini. Kegiatan ini sukses karena barang yang dijual habis terjual.

c. Pos Wanita Keadilan (PWK)

Pos Wanita Keadilan (PWK) merupakan program Kerja bidang Kewanitaan DPD PKS Kabupaten Kudus yang dikoordinasi oleh Arie Widiana R., A.Md, selaku ketua bidang Kewanitaan DPD PKS

Kabupaten Kudus. Program ini merupakan program pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang dikhususkan pada pemberdayaan wanita. PWK mempunyai motto “membentuk wanita shalihah yang pintar”.

PWK merupakan program nasional PKS. Di DPD Kabupaten Kudus, PWK merupakan program unggulan karena PWK yang paling banyak menyelenggarakan kegiatan secara kontinyu.

“PWK itu merupakan program nasional PKS se-Indonesia. PWK di Kudus memang yang paling sering menyelenggarakan kegiatan bagi ibu-ibu. Oleh karena itu, PWK dapat dianggap sebagai program partai yang paling unggulan dibanding program partai atau kegiatan PKS yang lain” (wawancara dengan Pak Giri, ketua DPD PKS Kabupaten Kudus tahun 2006-2010 pada 16 Maret 2011).

Hal senada disampaikan oleh ketua bidang kewanitaan:

“PWK memang program kita yang paling diunggulkan. PWK yang berfungsi sebagai pintu rekrutmen dan pemberdayaan perempuan ini mempunyai sasaran ibu-ibu yang jumlahnya di Kudus lebih banyak daripada laki-laki. Maka, dengan mendekati kaum perempuan, kita berharap PKS semakin dikenal di masyarakat” (wawancara dengan Bu Arie, ketua bidang kewanitaan tahun 2006-2010 pada 18 April 2011).

PWK mempunyai 6 program pokok yaitu:

1) Sadar agama

Sadar agama, merupakan program PWK yang bertujuan agar para wanita menjadi pribadi wanita muslim yang shalihah dan mengerti agama karena wanita adalah tiang negara. Suatu negara akan menjadi baik jika wanitanya mampu menjaga diri mereka agar jauh dari hal-hal yang dilarang agama dan melaksanakan perintah agama. Selain itu, wanita juga sangat penting terkait perannya dalam keluarga karena ia yang akan menjaga kehormatan keluarga dan mendidik anak-anaknya.

Pelaksanaan program sadar agama dilakukan melalui pengajian rutin yang disebut dengan *ta'lim* atau *iqra'*. Pengajian ini dilaksanakan sepekan sekali di rumah kader PKS secara bergantian atau di kantor DPD PKS Kudus. Dalam pengajian itu, diberikan ceramah agama mengenai akidah, akhlak, fikih, dan sebagainya yang berkaitan dengan agama Islam. Kajian agama ini juga membantu para wanita yang belum bisa membaca Al Qur'an atau memperbaiki pelafalan Al Qur'an sesuai dengan makhras yang benar. Pembina atau pemateri dalam kegiatan ini berasal dari kader PKS sendiri, baik pria maupun wanita, sehingga tidak dikeluarkan biaya untuk ongkos pemateri.

*Ta'lim* atau *iqra'* diikuti oleh anggota wanita PKS Kabupaten Kudus. Selain itu, juga diberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk ikut bergabung dengan cara diberikan undangan untuk mengikuti acara kajian ini. Jika ada masyarakat yang tidak mendapat undangan tetapi ingin ikut juga diperbolehkan karena pada dasarnya kegiatan ini adalah untuk mengenalkan PKS di masyarakat. Harapan PKS, masyarakat tertarik untuk bergabung dengan PKS (sebagai metode rekrutmen politik) setelah mengikuti kegiatan *ta'lim* ini.

Target dari kegiatan ini adalah setidaknya para wanita ini mampu membaca Al Qur'an dan mampu memaknai arti yang terkandung dalam ayat-ayatnya serta pengetahuan Islamnya menjadi lebih mendalam dan pengetahuan fikihnya berkembang sesuai perkembangan zaman.

## 2) Sadar sosial dan politik

Program pokok yang kedua ini bertujuan agar para wanita sadar tentang kehidupan sosial dan politik. Kebanyakan wanita hanya aktif di bidang sosial masyarakat. Dengan adanya program ini mungkin akan ada wanita-wanita muslim yang turut dalam politik praktis.

Program pokok ini juga dilatarbelakangi banyaknya wanita di desa yang tidak mengerti tentang politik. Oleh karena itu, PKS ingin setidaknya wanita mengerti politik, misalnya pentingnya partisipasi politik karena satu suara merubah dunia. Selain itu, dengan program ini para wanita juga ditumbuhkan jiwa sosialnya melalui kegiatan sosial seperti santunan kepada anak yatim piatu. Santunan kepada anak yatim piatu dilaksanakan hanya insidental ketika hasil infaq yang dikumpulkan dalam kegiatan PWK terjadi saldo yang cukup untuk dibagikan kepada anak yatim piatu.

PWK dalam mengadakan kegiatan santunan lebih sering sebagai pelaksana lapangan saja. Sementara itu, kegiatan santunannya sendiri berasal dari DPD PKS Kudus. Jadi, kegiatan itu kegiatan bersama antara DPD dan PWK.

Sosialisasi politik dilakukan PWK ketika ada momen-momen tertentu misal dalam rangka adanya pemilu. PKS menunjukkan calon kepala daerah yang didukung oleh PKS kepada ibu-ibu. Bukan memaksa untuk memilih pasangan tersebut, tetapi hanya memperlihatkan profil calon kepala daerah yang didukung PKS. PWK juga mensosialisasikan cara-cara pemberian suara dalam pemilu tersebut.

Sosialisasi politik biasanya diberikan pada saat kegiatan *ta'lim* dilaksanakan. Cara pengumpulan massa melalui undangan yang disampaikan kepada tiap individu di suatu desa. Ada pula yang pengumpulan massanya ditangani oleh organisasi itu sendiri, misalnya PKK desa Peganjaran. Mereka tidak keberatan saat pelaksanaan pertemuan PKK diselingi dengan sosialisasi politik.

Dengan adanya sosialisasi politik di masyarakat diharapkan tingkat partisipasi politik masyarakat akan meningkat karena partisipasi politik sangat penting untuk menentukan nasib bangsa selanjutnya. Jangan sampai kekuasaan negara jatuh ke tangan yang salah.

### 3) Sadar pendidikan dan keterampilan

Dengan adanya program pokok ini, PKS ingin mewujudkan wanita yang menyadari pentingnya pendidikan, baik bagi dirinya maupun keluarganya, misalnya dengan melibatkan para wanita dalam berpartisipasi untuk membentuk taman baca sehingga wanita sebagai ibu mampu mengarahkan anaknya untuk rajin membaca.

PWK dalam setiap kali *ta'lim* memberikan semacam pengaruh bahwa pendidikan itu penting dalam rangka memperbaiki kehidupan. Dengan pendidikan yang tinggi, manusia mempunyai nilai tawar dalam memperoleh pekerjaan.

“Kalau di DPC Bae itu ada yang mengadakan bimbingan belajar. Sayangnya sekarang sudah tidak jalan karena kadernya sibuk dengan kesibukan sendiri dan juga minat dari siswa SD yang dibimbing sudah menurun. Tahun ini dengan kepengurusan yang baru kami berencana untuk mengawalinya lagi” (wawancara dengan Bu Syakdiyah, sekretaris DPC Bae, 8 Juli 2011).

“Sejak tahun 2009 kami juga mengadakan *Daurah* yaitu pelatihan atau sekolah khusus membaca Al Qur’an sesuai dengan makhraj yang benar. Tempat pelaksanaannya di SD Al Islam Demaan. Peserta kegiatan ini dulu ibu-ibu ikut tapi sekarang hanya remaja yang dilakukan jam 05.30 WIB pagi sepekan sekali dengan membayar Rp. 15.000,00 perbulan”. Sekolah ini mengacu pada standar sekolah Al Qur’an Al Hikmah yang berada di Jakarta yang mengadopsi kurikulum standar internasional (wawancara dengan Ibu Raudhah, kader wanita PKS pada 8 Juli 2011).

PKS juga memberikan pelatihan keterampilan misal keterampilan memasak, sehingga wanita dimungkinkan untuk membuka usaha dengan keterampilannya itu. Keterampilan ini berupa keterampilan memasak. Awalnya, dari pihak PWK sendiri telah mencoba membuat menu tertentu terlebih dahulu. Dicatat berapa biaya yang dihabiskan dan kira-kira produk ini pantas untuk dijual dan menghasilkan untung atau tidak. Setelah percobaan selesai barulah diajarkan ke masyarakat melalui pertemuan yang diadakan PWK atau *ta’lim*.

“Menu yang sudah saya coba dan saya ajarkan kepada ibu-ibu dalam kegiatan pelatihan keterampilan memasak yaitu abon lele dan sirup mbak. Biaya yang dikeluarkan berasal dari dana pribadi, toh sekalian untuk coba-coba sendiri” (wawancara dengan ibu Syakdiyah, kader wanita PKS pada tanggal 8 Juli 2011).

#### 4) Sadar ekonomi keluarga

Sadar ekonomi keluarga merupakan program pokok PWK di mana kader wanita PKS mempunyai harapan untuk membuat wanita mampu membantu ekonomi keluarga. Jadi, tulang punggung keluarga tidak hanya pada suami.

Cara yang digunakan PKS untuk mewujudkan hal itu salah satunya adalah ketika pengajian rutin dilaksanakan diadakan semacam seminar peluang usaha dan mengelolanya. Selain itu juga diberikan

motivasi-motivasi untuk menumbuhkan minat berbisnis. PWK juga sempat satu kali memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 200.000,00 kepada salah satu simpatisan di Bae untuk menambah modal usaha membuat mukena. Hasil lain yang telah dicapai yaitu terbentuknya Koperasi Simpan Pinjam Khatijah di Demaan sejak tahun 2010.

5) Sadar pangan dan gizi keluarga

Program pokok ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan pangan dan gizi sehingga dapat meningkatkan kesehatan keluarga. Pandangan masyarakat yang salah mengenai makanan yang bergizi adalah makanan yang mahal perlu diarahkan bahwa makanan bergizi tidak harus mahal tetapi ada yang murah yang dapat ditemukan di sekitar kita.

Penyadaran ini diberikan melalui pertemuan rutin, misalnya dalam kegiatan PWK yang memberikan susu kedelai kepada anak-anak sebagai contoh makanan sehat.

“Di DPC Kota kami setiap sepekan sekali yaitu setiap hari Jum’at mengadakan pemberian makanan tambahan kepada balita sekitar kantor DPC PKS Kota, misalnya susu kedelai. Tempat pelaksanaan kegiatan ini di kantor DPD PKS yang sekaligus sebagai kantor DPC PKS Kota. Kami juga selingi dengan arisan agar kegiatan ini lebih menarik bagi kaum ibunya” (wawancara dengan Ibu Raudhah, kader wanita PKS Kudus pada 8 Juli 2011).

6) Sadar kesehatan dan lingkungan

Program pokok ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para ibu pentingnya kebersihan lingkungan keluarga untuk membentuk jiwa yang sehat.

Para ibu diberikan tips-tips untuk memelihara lingkungannya agar tetap sehat, misalnya untuk menanam pohon di sekitar rumah untuk meningkatkan kualitas udara bersih di lingkungan rumah.

“Kegiatan pemeriksaan kesehatan Lansia yang masih jalan sampai saat ini, mbak, di desa Prambatan. Kegiatan yang lain sudah tidak berjalan karena setelah pemilu itu kegiatan sudah jarang dilakukan. Yang sering dilakukan ya pembinaan kader saja” (wawancara dengan Bu Syakdiyah, kader PKS pada 8 Juli 2011).

Tujuan diadakannya PWK adalah untuk pintu rekrutmen, pendekatan, pelayanan masyarakat dan pencitraan partai dalam rangka kemenangan pemilu 2009. Secara kuantitatif, DPD PKS Kabupaten Kudus telah berhasil mengadakan PWK di setiap DPC PKS di Kudus. Namun, secara fungsi dan kualitas PWK belum optimal sebagai pintu rekrutmen, pendekatan, pelayanan masyarakat dan pencitraan partai. Belum optimalnya fungsi PWK ini disebabkan karena kurang adanya semangat dan kesadaran untuk secara kontinyu mengadakan kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan wanita di masyarakat.

Beberapa upaya yang dilakukan bidang kewanitaan PKS Kudus dalam mengoptimalkan PWK diantaranya pemilihan PWK Teladan.

“Kita mengadakan semacam kompetisi PWK Teladan dengan memberikan piala bergilir dan uang pembinaan kepada PWK yang paling aktif mengadakan kegiatan dan rapi secara administrasi (tahun 2007 PWK Gebog dan tahun 2008 diraih PWK Bae). Selain itu, juga dilakukan koordinasi rutin 3 bulanan dan sosialisasi program bidang kewanitaan pusat” (wawancara pada 18 April 2011 dengan Bu Arie, Ketua Bidang Kewanitaan DPD PKS Kudus tahun 2006-2010).

“Dulu, antar PWK ditandingkan, yang menang akan mendapat piala” (wawancara dengan Bu Syakdiyah, kader PWK pada 8 Juli 2011).

Melalui PWK, dilaksanakan berbagai macam kegiatan seperti:



### 1) Gerakan Sayang Ibu (GSI)

Gerakan Sayang Ibu (GSI) merupakan suatu gerakan yang dilaksanakan dalam upaya membantu salah satu program pemerintah untuk peningkatan kualitas hidup perempuan melalui berbagai kegiatan yang berdampak terhadap upaya penurunan angka kematian ibu hamil dan melahirkan.

Peresmian pertama GSI sekaligus peresmian PWK Jekulo dilaksanakan pada 28 Desember 2006 di rumah ketua DPD PKS Kudus, dr. H. Bahana Sugiri Jalan Siliwangi 5/7, Jekulo untuk memaknai hari ibu oleh Ari Widiana. Program skala nasional ini juga dilakukan di DPC-DPC PKS sekabupaten Kudus, bertujuan untuk memberikan stimulan agar memperhatikan gizi keluarga terutama pada ibu hamil dan ibu menyusui.

Sementara itu peresmian PWK Undaan dilaksanakan oleh Aeda E.,S.K.M, M.Si dan dilanjutkan dengan penyuluhan mengenai anemia yang terjadi pada sepertiga remaja putri dan wanita usia subur serta sekitar 50% ibu hamil, bahaya anemia, dan memberikan tips mencegah dan mengobati anemia.

“Saya waktu itu turut membantu dalam peresmian PWK di Undaan. Setelah peresmian, ibu-ibu diberikan penyuluhan mengenai anemia yang sering terjadi pada kaum wanita. Respon dari masyarakat saya rasa cukup bagus. Mereka mempunyai rasa ingin tahu untuk hal-hal baru yang jarang didiskusikan. Bagi kami, itu menguntungkan karena ibu-ibu akan mempunyai rasa kesadaran untuk lebih tahu tentang diri mereka” (wawancara dengan Aeda Erna, simpatisan PKS pada 31 Mei 2011).

Metode yang digunakan pada program ini adalah meningkatkan kesadaran keluarga dengan penyuluhan dan pendampingan, pembentukan

kelompok masyarakat yang terdiri dari masyarakat sasaran dan pembangunan.

“Adanya bantuan makanan bergizi pada saat pelaksanaan program hanyalah simultan untuk mengurangi beban keluarga sasaran/korban dan merangsang mereka untuk secara mandiri mengupayakan perilaku sadar gizi” (wawancara pada 18 April 2011 dengan Bu Arie, Ketua Bidang Kewanitaan DPD PKS Kudus).

Dengan adanya program ini diharapkan perhatian kepada ibu khususnya ibu hamil dapat menjadi langkah preventif untuk menekan angka kematian ibu. Ibu sehat, anak sehat dan bangsa pun kuat.

## 2) Pelatihan Keterampilan

Pelatihan keterampilan ini dilakukan sebagai salah satu kegiatan PWK. Seperti yang pernah dilakukan di PWK Gribig, Gebog pada 8 Oktober 2006. Para ibu dilatih membuat sirup dan koktail buah. Tujuan dari kegiatan pelatihan keterampilan ini adalah pelatihan ini akan membantu para ibu untuk mempunyai ketrampilan yang dimungkinkan untuk menjadi usaha rumahan. Tujuan ini tidak terlepas dari program pokok PWK yaitu sadar pendidikan dan keterampilan dan sadar ekonomi keluarga.

## d. Donor Darah

Keprihatinan PKS turut muncul ketika terjadi wabah demam berdarah. Keprihatinan ini mereka tunjukkan dengan mengadakan bantuan donor darah ketika Milad PKS ke-9. Kegiatan donor darah ini juga dalam rangka gerakan “1500 kantong darah untuk Jawa Tengah” yang merupakan salah satu program DPW PKS Jawa Tengah. Kegiatan donor darah ini diharapkan mampu membantu masyarakat yang sedang membutuhkan

bantuan donor darah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 April 2007 di kantor DPD PKS Kabupaten Kudus yang dimulai sekitar pukul 08.00 WIB.

Kegiatan ini diikuti oleh kader dan simpatisan PKS di Kabupaten Kudus. Pelaksanaan donor darah terlaksana atas kerjasama DPD PKS Kabupaten Kudus dengan Unit Donor Darah PMI Kabupaten Kudus yang menerjunkan 6 petugas untuk mengambil darah dari para sukarelawan. Tim ini diketuai oleh dr. H. Budiono, M.S (Kepala UTD PMI Cabang Kudus). Dari 78 orang yang terdaftar dalam kegiatan donor darah ini diperoleh kantong darah yang sehat sebanyak 67 kantong darah (lampiran ).

Kegiatan ini diharapkan dapat berlangsung secara rutin. Selama ini kader-kader PKS melakukan donor darah hanya jika ada masyarakat yang membutuhkan saja yang dikoordinasi melalui bagian kepanduan oleh Bapak Nurfinto selaku ketua Dewan Pengurus ranting PKS Desa Loram Wetan.

e. Beasiswa

Program beasiswa ini ditekankan untuk dilaksanakan secara mandiri oleh DPC-DPC PKS di Kudus dengan kerja sama DPD PKS Kabupaten Kudus. DPC yang terhitung sukses melaksanakan program bantuan beasiswa ini adalah DPC PKS Kecamatan Jati dan DPC PKS Kecamatan Bae.

Sumber dana program bantuan beasiswa ini berasal dari dana zakat, infaq dan shodaqoh dari para kader itu sendiri maupun masyarakat umum yang memang mempercayakan untuk mengelola uang yang dizakatkan.

Program ini dilaksanakan secara berkala tergantung dari banyaknya dana yang dikelola. Pemberian bantuan beasiswa ini pernah dilakukan pada

bulan Januari sampai dengan April tahun 2009 dan 2 tahun sebelumnya. Bantuan beasiswa ini diberikan kepada beberapa siswa dari jenjang SD, SMP, maupun SMA yang telah diusulkan Dewan Pengurus Ranting dan disetujui oleh DPC PKS. Bantuan beasiswa ini berupa uang dengan nominal dari Rp 25.000,00 sampai Rp 50.000,00 per bulan. Siswa yang menerima beasiswa tidak hanya berasal dari anak kader PKS tetapi juga dari masyarakat umum.

“Kita memberikan bantuan beasiswa ini tergantung banyak tidaknya orang yang menitipkan infaqnya kepada kita untuk dikelola. Jika ada uang yang dipercayakan kepada kita untuk dikelola, ya kita kelola. Jadi, beasiswa ini tidak terus menerus tergantung banyak tidaknya sumber dana yang dipercayakan untuk dikelola” (wawancara dengan Pak Sayyid Yunanta, Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan, pada 16 April 2011).

Respon dari orang tua sangat senang dengan adanya program ini. Berikut keterangan dari Pak Sulhan orang tua dari Layla seorang siswi SMP yang mendapat bantuan beasiswa dari PKS:

“Saya senang mbak anak saya mendapat tambahan uang saku tiap bulan Rp 25.000,00 selama 4 bulan dari bulan Januari sampai bulan April 2009. Uangnya ya lumayan bisa dipakai anak saya buat bayar LKS” (wawancara dengan Pak Sulhan, orang tua Layla, penerima beasiswa PKS, pada 11 April 2011).

Selain melalui kegiatan atau program kerja partai, DPD PKS Kabupaten Kudus juga berusaha mengaktualisasikan visinya melalui kader-kadernya yang menjadi anggota dewan di DPRD Kabupaten Kudus.

Selama menjadi anggota dewan di DPRD Kabupaten Kudus, kader PKS mengaktualisasi visi sejahtera PKS dengan memberikan pengaruh atau pendapatnya terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan ke DPR. Respon sebagai anggota dewan terhadap pembahasan Ranperda dianggap

sangat penting karena bagi mereka pembangunan itu membutuhkan kekuatan hukum yang jelas, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. FPKS akan mendukung kebijakan pemerintah yang menguntungkan rakyat dan yang merugikan masyarakat serta tidak masuk prioritas yang berkesan menghamburkan anggaran tentunya akan dikritisi.

Kader-kader PKS di DPRD juga berinisiatif untuk mengajukan usulan Ranperda kepada pemerintah, misalnya kebijakan yang mengatur zakat terkait dengan upaya pemerintah daerah dalam mendayagunakan otonomi daerah sekaligus menindaklanjuti Undang-Undang tentang zakat. Inisiatif FPKS juga adanya keinginan untuk menciptakan Perda tentang pendidikan yang di dalamnya nanti akan mengatur masalah seragam siswa. FPKS berkeinginan agar siswa muslim putri dianjurkan untuk mengenakan jilbab di sekolah dan untuk putra dianjurkan mengenakan celana panjang bukan celana pendek lagi, tetapi rancangan ini belum selesai ketika masa jabatan DPRD tahun 2004-2009 telah berakhir. Inisiatif PKS selanjutnya yaitu untuk memunculkan Perda Miras, diharapkan Kudus akan menjadi kota yang bebas minuman keras/ alkohol. Ide ini ditentang oleh FPDIP yang menyatakan tidak setuju untuk bersih total dari alkohol. FPDIP berpandangan minuman beralkohol dengan persentase alkohol yang rendah misal 0,5 % masih bisa diperbolehkan beredar.

Usulan-usulan untuk memunculkan perda seperti di atas tak lain sesuai untuk mewujudkan perjuangan partai untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat yang dimaknai oleh PKS tidak hanya sejahtera secara materi tetapi juga secara immateri. Sayangnya ide-ide pemunculan Perda ini belum

terrealisasikan karena keterbatasan waktu dan belum dijadikan prioritas Pemerintah Kabupaten.

Kebijakan haruslah mengarah pada pelayanan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan komitmen pemberantasan korupsi). Kesejahteraan dapat diukur melalui *Human Development Index* dengan indikator utamanya penghasilan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk meningkatkan *HDI* dapat dilakukan ketika pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu kebutuhan pokok dan kebutuhan pengembangan sektor unggulan yang dapat diidentifikasi dari mata pencaharian. Untuk itulah FPKS untuk mewujudkan visi sejahtera PKS maka mengarahkan kebijakan pemerintah kepada hal-hal yang menyejahterakan rakyat.

Melalui beberapa pandangan, FPKS mencoba merealisasikan visi sejahtera. Pendapat atau pandangan-pandangan FPKS antara lain adalah sebagai berikut.

Pada 30 Agustus 2005, FPKS secara umum menyampaikan bahwa Ranperda tentang retribusi parkir memang dirasa perlu hanya saja ada beberapa hal yang harus dikaji, misalnya besar nominal agar tidak memberatkan masyarakat mengingat saat itu pemerintah akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kritikan atas keterlambatan penyelesaian proyek pemasangan tiang dan jaringan listrik penerangan jalan umum yang telah ada dalam nota kesepahaman disampaikan FPKS pada rapat paripurna tanggal 11 Januari 2006. FPKS mengatakan sebaiknya pemerintah meminta denda kepada pelaksana proyek karena proyek ini telah dibayar tetapi pelaksanaan di lapangan terjadi keterlambatan dan asal jadi. Selain itu FPKS juga mengkritisi proyek

pembangunan terminal bus Kudus yang dinilai tidak merupakan prioritas dan tidak mendesak walaupun dari pihak eksekutif mengatakan proyek pembangunan terminal bus ini sudah melalui studi dalam manajemen lalu lintas tetapi ternyata diketahui hasil studi itu tidak dibuat sebelumnya. Penolakan pembangunan ini disebabkan karena FPKS khawatir proyek ini akan tidak optimal penggunaannya seperti proyek incenerator yang ada di desa Loram Wetan yang tidak optimal penggunaannya saat ini. Diharapkan anggaran untuk proyek pembangunan terminal dapat dialokasikan untuk proyek lain yang lebih mendesak seperti untuk anggaran pendidikan yang di Kudus pada tahun 2006 ini hanya sekitar 4,9 % dari 20 % yang diamanatkan oleh UU No. 20 Tahun 2003. Pada akhirnya FPKS menyatakan tidak menyetujui RAPBD tahun 2006 dengan pertimbangan masih dapat dilakukan rasionalisasi RAPBD berdasarkan skala prioritas yang mana proyek yang akan didahulukan mengingat saat itu anggaran Pemkab sedang defisit.

FPKS melihat ada penyalahgunaan anggaran proyek lampu penerangan jalan umum. Dari studi banding mengenai proyek yang sama di Surabaya, diketahui bahwa untuk satu tiang hanya memerlukan anggaran sekitar 5,6 juta Rupiah sementara Pemkab Kudus menganggarkan satu tiang lampu sebesar 11 juta Rupiah. Kemudian dalam pelaksanaan proyek juga ditemukan kembali penyalahgunaan anggaran. Beton pemasang tiang lampu yang seharusnya setebal 1 meter ternyata tidak memenuhi aturan standar.

Pada sidang di hari yang sama, FPKS juga meminta Pemkab untuk mendesak Pemerintah Propinsi agar normalisasi Kali Londo di Kecamatan Undaan Kudus segera dilaksanakan demi kepentingan petani di daerah tersebut karena kegiatan ini sebenarnya kewenangan Pemerintah Propinsi dan harus

dilakukan secara bersama dengan Kabupaten lainnya di Jawa Tengah yang dilintasi sungai ini.

Dalam rapat paripurna tanggal 16 November 2006 melalui juru bicara Setia Budi Wibowo, S.Ag, M.M menyampaikan beberapa saran dalam pendapat akhir FPKS terhadap Ranperda tentang perubahan APBD Kabupaten Kudus tahun 2006. Dalam pendapat akhir FPKS itu FPKS menyetujui raperda ini dengan saran agar pemerintah sungguh-sungguh dalam membenahi Rumah Sakit Daerah dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan oleh Tenaga Medis dan Para Medis karena masih ada keluhan dari masyarakat tentang dokter yang tidak disiplin, Para Medis yang tidak ramah dan ruangan Rumah Sakit yang kumuh. Sementara itu, di bidang pendidikan FPKS menyampaikan bahwa pengadaan alat pendidikan dan laboratorium bahasa harus dijaga kualitas mutunya, sehingga tidak mengecewakan sekolah-sekolah penerima bantuan. Harapannya dengan adanya bantuan pengadaan alat pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan peserta didik akan lebih mudah memahami pelajaran. Saran selanjutnya yang disampaikan dalam rapat paripurna ini adalah mengenai rencana pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dengan KWH meter oleh PLN agar segera bisa diselesaikan tepat waktu, sehingga dapat mengurangi pengeluaran pajak penerangan jalan umum.

Dalam pandangan umum terhadap 8 Ranperda Kabupaten Kudus pada 27 Juni 2007, FPKS mengkritik pemerintah bahwa sudah saatnya pemerintah Kabupaten Kudus untuk meringankan beban rakyat miskin dengan membebaskan mereka dari segala retribusi layanan kelas III rumah sakit. FPKS



memberikan pandangan untuk sumber pendanaannya dapat diambil dari APBD atau perusahaan tempat buruh bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan selama 2 hari selama masa reses, pada tahun 2007, ketika sedang dalam masa pembahasan terhadap penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kudus Tahun 2007. Penyerapan aspirasi ini dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 November 2007 di 4 Balai Desa yaitu Desa Panjang, Gribig, Bulungcangkring, dan Dema'an. Kegiatan ini diikuti oleh konstituen PKS, warga dan tokoh masyarakat dari semua Daerah Pemilihan yang masing-masing dihadiri oleh 80 orang.

Bentuk kegiatan ini adalah sosialisasi tentang kedewanan serta tanya jawab dengan tamu undangan. Banyak sekali masukan yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang akan datang. Aspirasi masyarakat di bidang kesejahteraan yaitu pemerintah diharapkan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin dan mengutamakan penduduk asli Kudus, menambah alokasi dana untuk pendidikan moral dengan rehabilitasi pembangunan Madrasah Diniyah maupun TPQ, pelayanan pengobatan murah di Rumah Sakit Daerah bagi masyarakat yang tidak mempunyai ASKES, larangan pembelian buku paket sekolah sendiri, pemerintah memperhatikan janda-janda fakir miskin, kesejahteraan guru bantu hendaknya tidak dibedakan dengan honorer daerah, usulan subsidi Ujian Nasional bagi MI, MTs dan MA dan perlunya distribusi Raskin yang tepat sasaran.

Dalam rapat paripurna tanggal 16 Juli 2009 yang membahas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus FPKS melalui juru bicara Setia Budi Wibowo, S.Ag, M.M mengutarakan pendapat umum FPKS

bahwa pelayanan oleh pemerintah harus senantiasa ditingkatkan, apalagi dalam pelayanan program KTP dan KK gratis serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin masih banyak pengaduan dari masyarakat. Jangan sampai ada pejabat yang mengatakan “gratis, tapi minta baik dan cepat”. Pemerintah telah membayar untuk anggaran program ini. sehingga masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan ini dengan baik.

DPR mempunyai hak inisiatif yaitu hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Jika dalam konteks DPRD Kabupaten berarti hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Dalam kenyataan ternyata pengajuan rancangan pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Kudus lebih sering muncul dari inisiatif lembaga eksekutif dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Kudus. Hal ini terjadi karena lembaga eksekutiflah yang melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh eksekutif bersama dengan DPRD, sehingga lembaga eksekutif lebih memahami keadaan di lapangan, mengenai hal-hal yang sedang dibutuhkan masyarakat. Berikut adalah tahap pembuatan kebijakan yaitu:

- a. Pembuatan draf Raperda oleh eksekutif.

Pembuatan draf ini dilakukan oleh Tim Penyusun Raperda.

- b. Pengajuan draf Raperda ke DPRD.
- c. Pembuatan agenda Rapat Paripurna:
  - 1) Penjelasan Bupati terhadap Raperda yang diajukan dalam Rapat Paripurna.
  - 2) Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.
  - 3) Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi
  - 4) Dengar pendapat ahli atau masyarakat.

- 5) Laporan Panitia Khusus.
  - 6) Rapat Fraksi-Fraksi.
  - 7) Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi
- d. Penetapan Raperda menjadi Perda
  - e. Ratifikasi Perda.
  - f. Lembaran Daerah.

### **3. Faktor Pendukung dan Penghambat Aktualisasi Visi Sejahtera**

#### **a. Faktor Pendukung Aktualisasi Visi Sejahtera PKS DPD PKS Kabupaten Kudus**

Faktor pendukung Aktualisasi visi sejahtera PKS DPD PKS Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut.

##### **1) Solidaritas Partai**

Terlaksananya program-program DPD PKS Kabupaten Kudus tidak terlepas dari solidaritas, baik itu antarpengurus harian, kader, maupun simpatisan. Mereka secara otonom menyadari kewajibannya sebagai bagian dari PKS mempunyai kepentingan bersama yaitu berjuang dan berdakwah melalui politik. Perbedaan latar belakang pendidikan, profesi, maupun cara pandang Islam atau mazhab yang digunakan dalam memahami Islam, ternyata tidak membuat perpecahan dalam diri DPD PKS Kabupaten Kudus. Tidak ada perbedaan antara bawahan dan atasan, semuanya sama dan mempunyai rasa yang sama sebagai bagian dari PKS. Solidaritas yang baik membuat anggota PKS terhitung sangat loyal kepada partainya.

“Terkadang, memang terjadi beda pendapat karena kita adalah kumpulan orang banyak yang belum tentu mempunyai pandangan yang sama dalam suatu hal. Jadi, wajar bila ada perbedaan pendapat tetapi jika hal yang didebatkan sudah mengenai kepentingan PKS maka para kader menyatukan pikiran sesuai dengan keputusan yang telah digariskan partai. Anggota harus patuh pada keputusan partai” (wawancara dengan dr. Giri, mantan ketua DPD PKS Kudus periode 2006-2010, pada 16 Maret 2011).

## 2) Soliditas Partai

Soliditas partai terletak pada organisasi itu. Partai harus mampu mengkoordinasi anggotanya di tiap struktur agar mereka tetap berjuang untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai PKS. PKS mempunyai struktur Dewan Pengurus Daerah (DPD) di tingkat Kabupaten/Kota, Dewan Pengurus Cabang (DPC) di tingkat Kecamatan, dan Dewan Pengurus Ranting (Depera) di tingkat Desa.

Untuk menjaga soliditas antarstruktur, diadakan rapat koordinasi (rakor) rutin. Rakor rutin dilaksanakan sebulan sekali bagi DPD dengan DPC dan bagi DPC dengan Depera dilaksanakan dua bulan sekali. Melalui rakor rutin DPD dapat mengetahui perkembangan struktur di tiap kecamatan dan desa, mengevaluasi kegiatan partai yang telah dilaksanakan yang dapat digunakan sebagai data untuk menentukan kebijakan partai selanjutnya.

Selain rapat koordinasi rutin, diadakan juga rapat koordinasi insidental jika dipandang perlu. Seperti yang terjadi pada 8 Juli 2011, diadakan rapat koordinasi di kantor DPD PKS Kudus untuk membahas program-program partai yang berhenti pelaksanaannya. Tujuan dari rapat itu adalah untuk mengawali lagi program-program yang terhenti yang

masih mungkin untuk dilaksanakan saat ini dan yang efektif untuk mendapat dukungan massa.

Untuk menjaga soliditas partai, PKS juga memberikan pembinaan yang dilakukan secara bertahap. Bagi PKS, pembinaan internal yang dilakukan kepada anggota sangatlah penting.

“Suatu partai memang perlu untuk mewujudkan visinya di masyarakat dengan berbagai kegiatan sosial dan kegiatan semacamnya yang langsung dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat. Tetapi kami rasa hal itu saja tidaklah cukup dan cenderung tidak efektif untuk menyejahterakan masyarakat karena kami akui sebagai partai tidak bisa menyelenggarakan kegiatan itu secara terus-menerus. Oleh karena itu, kami merasa untuk merubah suatu bangsa agar menjadi lebih sejahtera, perlu diawali dari pembentukan karakter tiap individunya. Jadi, kegiatan di DPD PKS Kabupaten Kudus itu dominan dengan pembinaan atau kajian, masyarakat muslim Kudus itu perlu dikenalkan, ditanamkan, dan diarahkan untuk mengamalkan nilai-nilai Islam. Jika mereka mampu mengamalkan nilai Islam, tentu mereka akan menjadi orang yang berakhlak mulia” (wawancara dengan Pak Bowo, anggota DPRD Kudus FPKS tahun 2009-2014 pada 21 Maret 2011).

Untuk membentuk kader yang berakhlak baik, PKS mempunyai cara yang khas dalam melakukan pembinaan anggotanya. Pembinaan anggota PKS adalah sebagai berikut.

a) *Halaqah (small group technique)*

*Halaqah* adalah semacam kajian agama yang terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang terdiri 1 orang tentor atau pembina dan beberapa orang kurang lebih 10 sampai 15 orang sebagai murid dalam satu kelompoknya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan mengenai agama Islam dan cara penanaman akhlak mulia sesuai ajaran Islam. Dalam kajian agama ini,

diisi dengan membaca dan dilanjutkan dengan mendalami Al Qur'an kajian agama ini dilaksanakan di lingkungan Depera PKS (lingkup satu desa) setiap seminggu atau dua minggu sekali.

Materi yang diberikan dalam kegiatan kajian Islam ini pada dasarnya adalah tentang Islam. PKS mempunyai manhaj tarbiyah yaitu semacam kurikulum yang berisikan materi-materi, tujuan, dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Manhaj tarbiyah ini dibuat oleh PKS di tingkat pusat (lampiran ). Pembina akan menyampaikan materi yang telah disusun sesuai tahapan yang telah disusun yang disesuaikan dengan kapasitas ilmu yang telah dimiliki murid yang dibina. Ada 3 macam prioritas perangkat pembelajaran yang dapat diberikan kepada murid. Prioritas 1 berisi materi-materi Islam dengan ruang lingkup dasar yang diperuntukkan bagi murid yang mempunyai sedikit ilmu tentang Islam. Prioritas 2 berisi materi-materi Islam dengan ruang lingkup yang lebih mendalam yang diperuntukkan bagi murid yang telah menguasai materi prioritas 1. Prioritas 3 juga berisi materi-materi Islam dengan cakupan yang lebih mendalam lagi. Pada dasarnya materi-materi yang dikategorikan dalam prioritas 1, 2, ataupun 3 adalah sama yaitu tentang Islam, hanya saja lingkup untuk mendalaminya yang berbeda yang disesuaikan dengan kemampuan murid yang dibina. Adapun untuk mengikuti perkembangan zaman maka yang disesuaikan atau diperluas lagi kajiannya adalah fikihnya, misalnya *Multi Level Marketing (MLM)* dipandang dari agama Islam.

Dampak dari kegiatan ini adalah para kader binaan bisa semakin mendalami Islam yang juga dijadikan sebagai asas dari PKS. Jadi kader tidak hanya berdakwah di lingkungan masyarakat saja, tetapi juga melalui partai politik yang dulu dianggap *bid'ah*.

b) Taklim Rutin Partai (TRP)

Taklim Rutin Partai (TRP) adalah sarana *tarbiyah* untuk anggota pemula dan sarana silaturahmi bagi seluruh kader dan simpatisan dalam Depera yang bergabung dalam DPC masing-masing.

Taklim Rutin Partai di Kudus biasanya diadakan dalam majelis yang dilakukan pada minggu terakhir dalam satu bulan (sesuai jadwal yang telah dibuat) yang biasanya berupa yasinan atau membaca Al Qur'an bersama. Dalam pengajian ini juga terkadang sekaligus sebagai sarana pelaksanaan program pokok pos wanita keadilan yaitu dengan cara melalui ceramah atau *motivation training* oleh narasumber yang diundang. Pesertanya adalah kader dan simpatisan PKS.

Dampak dari kegiatan ini adalah dapat meningkatkan interaksi dan silaturahmi antar kader dan simpatisannya sekaligus menambah wawasan kader dan simpatisan PKS.

Dalam pengajian ini, dipungut uang sukarela/infaq yang besarnya tidak ditentukan. Uang yang terkumpul ini biasanya digunakan untuk santunan anak yatim piatu.

Untuk pengajian rutin di DPRa Kaliputu dipusatkan di rumah ketua DPD PKS Kudus terbaru, Setio Budi Wibowo, S.Ag.M.M.

Perbedaan dari TRP dengan *halaqah* adalah lingkup pesertanya. TRP merupakan gabungan dari *halaqah* dari beberapa Depera yang bergabung dalam satu DPC.

c) *Mukhayam*

*Mukhayam* adalah sarana *tarbiyah jasadiyah* melalui latihan fisik dan simulasi ketaatan agar peserta siap menjadi prajurit dakwah dan siap menerapkan nilai Islam di masyarakat.

Kegiatan ini mirip dengan kepramukaan di mana ada pembagian tingkatan anggota dari anggota mula sampai dewasa. Sasaran kegiatan ini adalah untuk membiasakan peserta hidup di alam terbuka secara sederhana. Kegiatan ini pernah dilakukan oleh DPD PKS Kudus pada tanggal 26 November 2006 di Bumi Perkemahan Menawan, Kudus.

Dalam kegiatan ini juga diajarkan baris berbaris untuk melatih kepemimpinan. Hal ini menggambarkan bahwa untuk menjadi pemimpin harus yang tegas dan mau menerima kritik. Jika memang melakukan kesalahan atau tidak mampu menjadi pemimpin harus mau digantikan oleh yang lain.

Kegiatan ini sebenarnya untuk anggota putra maupun putri hanya saja untuk putri disesuaikan dengan kodratnya sebagai wanita jadi tidak sering dilakukan. Yang lebih aktif melaksanakan kegiatan kepramukaan ini tentunya adalah anggota PKS yang putra.

“Bagi wanita pernah diadakan tadafur alam atau hiking di Kajar, mbak. Jadi, pagi kami berangkat ke kajar kemudian hiking di daerah sekitar kajar lalu sorenya pulang, tidak sampai



menginap seperti kegiatan bagi pria” (wawancara dengan Bu Syakdiyah, kader wanita PKS pada 8 Juli 2011).

Dari kegiatan-kegiatan di atas, PKS berharap terjadi kedekatan emosional antar anggota sehingga saling memahami antar anggota dan tumbuh kecintaan kepada PKS.

PKS mempunyai basis binaan yaitu kader yang dibina melalui kajian-kajian agama yang nantinya akan menyampaikan ilmunya kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya, misal lingkungan masyarakat atau tempat kerja.

Di Kabupaten Pati, sejak dari tingkat SMA para siswa dibidik untuk diarahkan menuju arah politik. Melalui organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII), para siswa secara tidak langsung diberikan gambaran tentang PKS. Melalui kajian agama, mereka sering mendiskusikan Islam dengan segala seluk beluknya yang pada akhirnya mengarah pada orientasi partai politik Islam. Setelah siswa menyelesaikan studi di SMA mereka akan ditawarkan untuk bergabung ke PBB, PAN, atau PKS.

Sedikit berbeda dengan cara perekrutan anggota di Kabupaten Batang. Peneliti yang pada bulan November sampai Desember 2010 sedang melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata di desa Semampir Kabupaten Batang, pernah menjumpai Ketua DPD PKS Kabupaten Batang saat itu bersilaturahmi ke rumah salah satu warga mengajak beberapa siswa dari SMA 1 Subah yang berdomisili di desa itu untuk membentuk kelompok dan mengadakan kajian agama pada hari tertentu yang akan disepakati. Kajian agama ini juga disisipi orientasi politik. Dengan adanya pengenalan politik secara lebih dini, diharapkan siswa mempunyai orientasi politik setelah menyelesaikan studi di sekolah. Hal ini dapat dianggap sebagai fungsi partai

untuk memberikan pendidikan politik di masyarakat sehingga masyarakat mempunyai orientasi politik yang lebih baik.

“PKS membidik kalangan muda karena mereka dianggap sebagai generasi yang belum tercemar oleh berbagai permasalahan politik kotor dan mempunyai masa depan yang lebih panjang dibandingkan dengan generasi orang tua sehingga pembinaan akan lebih mudah diterima. Pembinaan anggota untuk menjadi kader partai yang layak untuk menjadi tokoh partai atau pejabat publik itu perlu waktu yang lama, mbak. Jadi, kalau yang kita bina itu anak muda tentu hasil dari binaan akan lebih mengena dan menjadi kepribadiannya secara maksimal” (wawancara dengan Pak Parjono, mantan anggota DPRD Kudus dari FPKS tahun 2004-2009 pada 31 Mei 2011).

Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai kader. Partai ini menggembleng kadernya melalui berbagai kegiatan seperti kajian agama Islam dan doktrin akhlak mulia sehingga diharapkan kader yang dihasilkan adalah kader yang berakhlak baik.

“Untuk menjaring kader-kader baru, PKS mengadakan kegiatan TOP (Training Orientasi Partai). TOP merupakan rekrutmen secara terbuka dengan melibatkan masyarakat. Metode rekrutmen yang lain yaitu dengan mendatangi rumah-rumah, mendekati tokoh masyarakat, dan adanya mantan pengurus partai lain yang kemudian ditawarkan untuk bergabung dengan PKS mungkin mampu untuk mengembangkan PKS” (wawancara dengan dr. Bahana Sugiri, mantan ketua DPD PKS Kudus tahun 2006 pada 16 Maret 2011).

“Kalau di Kudus, rekrutmen anggota kita melalui keluarga atau kolega. Jadi ketika ada anggota keluarga yang bergabung dengan PKS biasanya anggota keluarga lainnya ada yang ikut. Terkadang melalui kenalan di sekolah, misal waktu SMA ikut PII kan sering ada kajian agama yang diisi oleh para aktivis, nah mungkin setelah dia lulus SMA dia tahu oh ternyata kakak ini orang PKS sehingga ikut bergabunglah ia ke PKS karena sudah mengenal salah satu kader PKS”. (wawancara dengan Drs. Parjono, mantan ketua FPKS tahun 2004-2009 pada 31 Mei 2011).

#### **b. Faktor Penghambat Aktualisasi Visi Sejahtera PKS DPD PKS Kabupaten Kudus**

Faktor penghambat dalam aktualisasi visi sejahtera PKS DPD PKS Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut.

### 1) Keterbatasan Dana.

PKS sebagai lembaga politik mempunyai kemampuan yang terbatas untuk tetap kontinyu melaksanakan program-program sosial seperti pasar murah, bakti sosial dan program lain yang membutuhkan dana dalam jumlah besar sangatlah susah. Bantuan dari simpatisan yang percaya dengan perjuangan dan kejujuran PKS, sehingga mereka memberikan bantuan dana memang ada, tetapi tidak dapat selalu diandalkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan sosial.

Selama ini dana lebih sering dikeluarkan dari dana pribadi anggota yang dikumpulkan melalui iuran wajib, shodaqoh, maupun infaq, sehingga ada slogan “Partai Kantong Sendiri” di mana para kader menggunakan uang pribadi dalam menggerakkan aktifitasnya. Setiap bulan ada iuran tersendiri yang wajib dikeluarkan oleh tiap anggota sebesar 7% dari jumlah penghasilannya tiap bulan. Nominal iuran sebesar 7% yang ditarik dari jumlah penghasilan per bulan ini adalah ketentuan yang telah ditentukan di tingkat pusat. Dana untuk kegiatan hari besar nasional dan pengkaderan partai termasuk dalam penggunaan iuran ini. Uang inilah yang digunakan sebagai dana untuk mengadakan suatu kegiatan. Ada pula pajak penghasilan sebesar 20 % yang berasal dari anggota PKS yang menjadi anggota DPRD yang diberikan tiap bulannya. Jika di kemudian hari ada kekurangan, maka akan diminta iuran kembali untuk menutup kekurangan dana yang dibutuhkan. Oleh karena itu, program partai akan tetap berjalan

“Partai politik tanpa dana maka tidak akan maksimal dengan hal-hal yang dikerjakan. Tetapi, bagi PKS kami itu adalah tim jadi ketika ada kekurangan dana maka sudah menjadi kesadaran kami untuk menyokong dana secara bersama agar kegiatan tetap berjalan. Walau

bagaimanapun kami sudah komitmen untuk melayani masyarakat”. (wawancara dengan dr. Giri, mantan Ketua DPD PKS Kudus periode 2006-2010, pada 21 Maret 2011).

Hal senada disampaikan oleh Drs. Parjono, anggota DPRD Kudus dari FPKS tahun 2004-2009, pada 31 Mei 2011:

“Keterbatasan dana dalam mengadakan kegiatan kami atasi dengan mengeluarkan dana pribadi. Pengeluaran ini tidak terasa berat karena dilakukan bersama antaranggota” (wawancara dengan Drs. Parjono, mantan ketua FPKS DPRD Kudus tahun 2004-2010, pada 31 Mei 2011).

Terbatasnya dana membuat PKS lebih memilih kegiatan yang harus dijalankan agar dana yang tersedia itu dapat mencapai tujuan partai secara efektif dan efisien.

## 2) Tokoh PKS di Kudus

PKS di Kudus belum mempunyai tokoh yang mempunyai kharisma besar di masyarakat. tokoh PKS di Kudus yang paling senior yaitu Drs. Parjono, mantan anggota DPRD Kudus tahun 2004-2010.

“Di Kudus, kelemahan PKS yaitu karena tidak mempunyai tokoh yang disegani dan yang dijadikan panutan oleh masyarakat. Kalau kita lihat partai lain, misalnya PKB. Di Kudus, PKB yang mempunyai kultur Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai tokoh yang sangat disegani masyarakat Kudus yang juga berkultur NU yaitu Kyai H. Sya’roni Achmadi. Sedangkan, PKS di Kudus yang paling senior itu saya. Tidak ada tokoh yang mempunyai kharisma yang disegani masyarakat Kudus. Anggota-anggota PKS dari sekitar 500 kader, 70 persen itu usia muda antara 25-40 tahun” (wawancara dengan Drs. Parjono, mantan ketua FPKS DPRD Kudus tahun 2004-2010, pada 31 Mei 2011).

Belum adanya tokoh besar di PKS mengakibatkan sulitnya mengintegrasikan masyarakat untuk mau menerima PKS. Terlebih lagi di Jawa masyarakat cenderung patrilineal dan kharisma dalam memilih tokoh

tertentu sebagai pemimpin. Terlebih, PKS adalah partai baru yang belum mempunyai basis massa yang besar di Kudus.

### 3) Kultur Islam Masyarakat Kudus

Masyarakat muslim di Kudus, mayoritas mempunyai kultur Islam tradisional atau Nahdlatul Ulama (NU). Kultur Islam tradisional ini tak lepas dari pengaruh ajaran Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam di Kudus. Masyarakat Kudus yang saat itu masih memeluk agama Hindu mulai dikenalkan kepada agama Islam melalui seni budaya, misalnya wayang kulit dan gamelan. Sebelum memulai pertunjukkan wayangnya, Sunan Kudus mengikat sapi di depan tempat yang akan digunakan untuk dakwah agar masyarakat tertarik untuk datang. Hal ini dilakukan Sunan Kudus karena beliau tahu bahwa sapi adalah hewan suci dalam agama Hindu.

Pencampuran budaya masyarakat dengan ajaran baru Islam ternyata efektif bagi keberhasilan internalisasi Islam di masyarakat Kudus, tetapi hal ini menjadikan kultur Islam masyarakat Kudus tidak murni, masih tercampur dengan budaya Hindu, misalnya menyembelih hewan harus dengan menyebut nama Allah SWT tetapi masyarakat Kudus tidak menyembelih sapi karena merupakan menghormati ajaran agama Hindu yang menganggap suci sapi.

Kultur Islam tradisional masyarakat Kudus menghambat DPD PKS Kabupaten Kudus. PKS yang merupakan partai baru yang dikenal tegas dalam menegakkan nilai-nilai Islam dianggap terlalu keras bagi masyarakat Islam tradisional Kudus. Masyarakat Islam tradisional Kudus terlanjur terbiasa dengan ajaran Islam yang dipadukan dengan budaya masa lalu,

sehingga ini menyebabkan muncul pandangan bahwa PKS mengusung ideologi yang berbeda yang cenderung ke-Muhammadiyah-an. Masyarakat Islam tradisional yang cenderung ke-NU-an tidak mau untuk mengikuti ajaran yang mereka anggap cenderung seperti ajaran Muhammadiyah. Sementara itu, PKS di mata sebagian masyarakat Kudus yang Muhammadiyah menganggap bahwa PKS dengan ideologi Islamnya tidak murni lagi seperti yang diyakini Muhammadiyah.

“Hambatan kita dalam mendekati masyarakat Kudus itu karena kultur sebagian besar Kudus kan orang NU. Mereka menganggap kita itu cenderung seperti Muhammadiyah. Jadi, ketika kita mengajak mereka, misalnya kajian, mereka merasa sudah mengaji padahal di PKS ngaji itu tidak hanya sekadar Yasinan dan sebagainya tetapi juga lebih mendalami Islam dan perkembangan fikihnya. Nah, lain lagi dengan masyarakat Muhammadiyahnya, mereka menganggap kita sudah tidak murni lagi karena memang di PKS itu terbuka, anggotanya ada yang berasal dari kultur NU maupun Muhammadiyah” (wawancara dengan Drs. Parjono, mantan ketua FPKS DPRD Kudus tahun 2004-2010, pada 31 Mei 2011).

## **B. Pembahasan**

### **1. Aktualisasi Visi Sejahtera PKS DPD PKS Kabupaten Kudus**

Dalam suatu organisasi, visi adalah suatu yang tidak dapat dipisahkan dari struktur organisasi atau ruh organisasi itu. Begitu pula dengan PKS sebagai suatu organisasi politik juga mempunyai visi. Visi Partai Keadilan Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat, sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera pasal 5 ayat 2.

Visi Partai Keadilan Sejahtera dirumuskan dalam beberapa program kerja partai yang dapat dianggap sebagai tujuan antara. Program kerja ini

dapat digunakan sebagai identifikasi apakah visi partai atau tujuan jangka panjang partai tercapai sesuai tujuan atau tidak.

Partai politik memerlukan strategi dalam usahanya memperoleh dukungan dari masyarakat. Partai politik akan mencari cara agar strategi yang digunakan membedakannya dengan partai pesaing, menunjukkan bahwa partainya yang paling kompeten untuk dipercaya menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Strategi pemasaran berguna untuk mempengaruhi konsumen, dalam hal ini masyarakat, dalam mengambil keputusan.

Dalam hasil penelitian, telah dideskripsikan bahwa DPD PKS Kabupaten Kudus sebagai bagian dari pelaksana visi sejahtera PKS pada periode 2006-2010 telah melaksanakan beberapa kegiatan partai. Kegiatan DPD PKS Kabupaten Kudus di bidang sosial, yaitu PRAS, pasar murah, PWK, donor darah, dan beasiswa. Di bidang ekonomi, bukan atas nama PKS, DPD PKS Kabupaten Kudus mendirikan koperasi simpan pinjam Khatijah di Demaan.

Kegiatan-kegiatan di atas dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkenalkan PKS dan menjalin hubungan yang baik di masyarakat, serta pencitraan PKS sebagai partai yang peduli dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori *positioning*, yaitu merancang pemasaran dan citra partai dalam benak konstituen, misalnya memposisikan partai sebagai partai yang selalu membela keadilan dan partai Islam dengan berbagai simbol Islam sebagai pencitraan partai tersebut (Widagdo, 1999).

Pencitraan ini sangat penting karena PKS berharap masyarakat akan memberikan timbal balik yang baik pada saat pemilu dengan mendukung

PKS, sehingga PKS mampu memenangkan pemilu. Hal ini sesuai dengan teori dari Prof. Mirriam Budiardjo, dibentuk dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Budiardjo, 2008:403).

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPD PKS Kabupaten Kudus ini sesuai dengan falsafah dasar perjuangan PKS. Dalam falsafah dasar perjuangan PKS disebutkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui beberapa bidang, salah satunya adalah bidang sosial dan ekonomi.

Dalam hasil penelitian, juga telah dideskripsikan bahwa kegiatan yang sangat intensif dilakukan oleh DPD PKS Kabupaten Kudus adalah pembinaan kader. Menurut PKS, pembinaan kader sangatlah penting. Selain karena PKS adalah partai kader, pembinaan ini juga berfungsi untuk memberikan pemahaman politik dari PKS kepada kader-kadernya. Pemahaman visi oleh anggota atau kader sangatlah penting karena aktualisasi tanpa diilhami visi organisasi maka akan sia-sia usaha yang dilakukan. Anggota haruslah dioptimalkan melalui pembinaan ini agar mampu mendukung dan memperkuat pencapaian visi sejahtera PKS.

Hal di atas sesuai dengan teori bahwa aktualisasi visi tidak lepas dari adanya kesadaran untuk saling mengisi kebutuhan bersama. Aktualisasi akan melibatkan interaksi dengan masyarakat atau lingkungan sosial dalam mewujudkan visi dan misi yang dicita-citakan. Oleh karena itu, para anggota partai politik baik yang merupakan kader partai ataupun simpatisan partai harus dilatih untuk tahu sedikit demi sedikit mengenai kebutuhan



masyarakat saat ini dan cara yang paling relevan untuk mewujudkan visi partai (Firmanzah, 2008).

Aktualisasi visi membutuhkan waktu yang relatif lama. Aktualisasi visi partai juga perlu diimbangi dengan pemikiran yang rasional sehingga tidak terkesan menjadi mimpi belaka.

Aspirasi-aspirasi masyarakat juga diusulkan ke lembaga legislatif untuk menjadi kebijakan. Hal ini sesuai dengan teori fungsi partai politik sebagai sarana artikulasi kepentingan, yaitu partai politik menyerap aspirasi yang ada dalam masyarakat melalui kader-kader partai yang ada di masyarakat yang kemudian dirumuskan sebagai program politik dan diusulkan kepada badan legislatif dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan, dengan cara pemenuhan kepentingan jika kelompok kepentingan mau mendukung calon itu (Rifai, 2010).

DPRD merupakan lembaga perwakilan daerah dan berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi dan di antara tugas dan wewenang DPRD adalah membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.

Hasil pemilu DPRD tahun 2004 menempatkan empat orang kader PKS di DPRD Kabupaten Kudus. Adanya fraksi tersendiri dan tidak tergabung dengan fraksi lain memberikan keuntungan yaitu mampu bersifat dominan dan independen untuk memberikan pendapat dalam satu fraksi. Hal ini sesuai dengan teori fungsi partai politik untuk menyalurkan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan, dan kebutuhan

kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik (Rifai, 2010: 31).

Sebaliknya, jika bergabung dengan fraksi dari partai lain tentunya kekuatan untuk memberikan pendapat fraksi tidak terlalu dianggap karena hanya sebagai pihak minoritas dalam fraksi gabungan.

Peran partai politik dalam pembuatan kebijakan umum sangatlah kecil, tetapi melalui kader-kadernya di DPRD tentu akan memberikan hasil yang lebih besar. Posisi sebagai anggota dewan dapat digunakan untuk memperjuangkan visi dan misi partai. Seperti halnya dengan PKS, PKS yang berasaskan Islam berusaha untuk menanamkan nilai-nilai Islam untuk menjadi sebuah kebijakan. Mereka juga mengarahkan kebijakan kepada visi dan misi mereka dalam hal ini adalah visi sejahtera. Hal ini sesuai dengan teori bahwa partai politik memang mempunyai *influence* atau pengaruh terhadap kebijakan umum (Firmanzah, 2008).

Kritik dan saran melalui pandangan umum dan pendapat akhir atas draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) diberikan oleh Fraksi PKS (FPKS) di DPRD Kabupaten Kudus dalam rapat paripurna DPRD. Semua itu tak lain agar fungsi pengawasan DPRD sebagai lembaga legislatif dapat berjalan dan pemerintahan yang baik yang mampu menyejahterakan masyarakatnya dapat terwujud.

Hal di atas sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kehadiran partai politik dalam sistem demokrasi tidak dapat lepas dari peran dan fungsinya karena partai politik dapat menempatkan kader-kadernya dalam jabatan pemerintahan yang akan menentukan arah kebijakan publik. Partai politiklah yang paling bertanggungjawab untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Perlu suatu proses pendidikan baik yang bersifat formal maupun non-formal untuk membentuk jiwa dan karakter pemimpin (Firmanzah, 2008: 70).

## **2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Aktualisasi Visi Sejahtera PKS DPD PKS Kabupaten Kudus**

### **a. Faktor Pendukung Aktualisasi Visi Sejahtera PKS DPD PKS Kabupaten Kudus**

Faktor pendukung Aktualisasi visi sejahtera PKS DPD PKS Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut.

#### 1) Solidaritas Partai

Dalam diri DPD PKS Kabupaten Kudus, tidak ada perbedaan antara bawahan dan atasan, semuanya sama dan antara atasan dan bawahan saling bekerja sama sebagai bagian dari PKS untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Solidaritas yang baik membuat anggota PKS terhitung sangat loyal kepada partainya. Hal ini sesuai dengan teori manajemen yang dikenal dengan istilah *the ten commandments of human relations* (Sutomo, 2007). Isi dari prinsip itu, antara lain adalah tidak memperlakukan bawahan sebagai mesin.

#### 2) Soliditas Partai

Soliditas partai terletak pada struktur organisasi itu. Partai harus mampu mengkoordinasi anggotanya di tiap struktur agar mereka tetap berjuang untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai PKS. PKS mempunyai struktur Dewan Pengurus Daerah (DPD) di tingkat Kabupaten/Kota, Dewan Pengurus Cabang (DPC) di tingkat Kecamatan, dan Dewan Pengurus Ranting (Depera) di tingkat Desa.

Untuk menjaga soliditas antarstruktur, diadakan rapat koordinasi (rakor) rutin. Rakor rutin dilaksanakan sebulan sekali bagi DPD dengan DPC dan bagi DPC dengan Depera dilaksanakan dua bulan sekali. Melalui rakor rutin DPD dapat mengetahui perkembangan struktur di tiap

kecamatan dan desa, mengevaluasi kegiatan partai yang telah dilaksanakan yang dapat digunakan sebagai data untuk menentukan kebijakan partai selanjutnya.

Selain rapat koordinasi rutin, diadakan juga rapat koordinasi insidental jika dipandang perlu. Seperti yang terjadi pada 8 Juli 2011, diadakan rapat koordinasi di kantor DPD PKS Kudus untuk membahas program-program partai yang berhenti pelaksanaannya. Tujuan dari rapat itu adalah untuk mengawali lagi program-program yang terhenti yang masih mungkin untuk dilaksanakan saat ini dan yang efektif untuk mendapat dukungan massa.

Untuk menjaga soliditas partai, PKS juga memberikan pembinaan kader yang dilakukan secara bertahap. Bagi PKS, pembinaan internal yang dilakukan kepada anggota sangatlah penting.

“Suatu partai memang perlu untuk mewujudkan visinya di masyarakat dengan berbagai kegiatan sosial dan kegiatan semacamnya yang langsung dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat. Tetapi kami rasa hal itu saja tidaklah cukup dan cenderung tidak efektif untuk menyejahterakan masyarakat karena kami akui sebagai partai tidak bisa menyelenggarakan kegiatan itu secara terus-menerus. Oleh karena itu, kami merasa untuk merubah suatu bangsa agar menjadi lebih sejahtera, perlu diawali dari pembentukan karakter tiap individunya. Jadi, kegiatan di DPD PKS Kabupaten Kudus itu dominan dengan pembinaan atau kajian, masyarakat muslim Kudus itu perlu dikenalkan, ditanamkan, dan diarahkan untuk mengamalkan nilai-nilai Islam. Jika mereka mampu mengamalkan nilai Islam, tentu mereka akan menjadi orang yang berakhlak mulia” (wawancara dengan Pak Bowo, anggota DPRD Kudus FPKS tahun 2009-2014 pada 21 Maret 2011).

Anggota PKS diarahkan ke dalam dua jalur. Pertama, jalur sebagai kader yang akan mendapatkan pembinaan rutin bagi kader yang ingin aktif dalam kehidupan kepartaian. Kedua, bagi kader yang tidak ingin aktif diikutkan

dalam pertemuan organisasi atau sebatas sebagai relawan yang dapat membantu sewaktu-waktu.

Adanya rekrutmen anggota akan menjadikan kaderisasi dan rotasi kekuasaan akan tetap berjalan di dalam diri PKS sebagaimana cirri demokrasi yang baik di mana terjadi rotasi kekuasaan. Semua kader mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin, masalahnya hanyalah waktu. Namun, ada kelemahan dengan adanya rotasi kekuasaan, yaitu di PKS belum fokus pada sosok tokoh tertentu jadi kekuatan ada pada tim. Selain itu, juga disebabkan karena kemunculan tokoh di PKS jarang yang bertahan lama.

Dalam memutuskan seseorang yang dicalonkan dalam jabatan tertentu di PKS merupakan hasil dari usulan-usulan anggota yang diakomodir dan disatukan sehingga dihasilkan siapa yang pantas untuk dicalonkan. Usulan ini akan diajukan pada jenjang di atasnya misal di propinsi. Jadi sudah tidak murni pemilihan dari anggota dengan suara terbanyak tetapi sudah ada arahan dan pertimbangan dari struktur yang lebih atas. Oleh karena itu, misalnya saja dalam pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2004 kemarin itu juga atas keputusan bersama anggota PKS. Jadi calon-calon anggota legislatif ini juga didanai oleh PKS dalam agenda kampanye dan sebagainya sampai terpilih. Misal calon yang tidak terpilih maka dana kampanye hilang. Sedangkan bagi calon yang terpilih dalam pemilu saat menjadi anggota dewan nanti berkewajiban untuk memberikan pajak penghasilan sebesar 20 % kepada partai untuk dijadikan salah satu sumber dana DPD PKS.

“Kami itu jadi kan karena partai, maka sudah kewajiban kami untuk memberikan 20 % gaji kami sebagai anggota dewan untuk diberikan kepada partai. Seperti misalnya saya dulu waktu kampanye mempunyai hutang kepada partai untuk dana kampanye, maka ketika saya gajian, gaji

itu dipotong 20 % untuk pajak penghasilan juga 37 % untuk hutang kepada partai (simpatisan yang membantu pencalonan saya)”. Kalau saya mencalonkan sendiri, dengan kondisi keuangan saya yang sederhana tentu tidak sanggup, wong nyalon bisa habis ratusan juta. Jadi saya tidak keberatan dengan potongan gaji sebesar itu” (wawancara dengan Drs. Parjono, mantan ketua FPKS tahun 2004-2009 pada 31 Mei 2011).

#### **b. Faktor Penghambat Aktualisasi Visi Sejahtera PKS DPD PKS Kabupaten Kudus**

Faktor penghambat dalam aktualisasi visi sejahtera PKS DPD PKS Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut.

##### **a. Keterbatasan Dana.**

Kemampuan partai untuk tetap kontinyu melaksanakan program-program sosial seperti pasar murah, bakti sosial dan program lain yang membutuhkan dana dalam jumlah besar sangatlah susah. Bantuan dari simpatisan yang percaya dengan perjuangan dan kejujuran PKS, sehingga mereka memberikan bantuan dana memang ada, tetapi tidak dapat selalu diandalkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan sosial.

Selama ini dana lebih sering dikeluarkan dari dana pribadi anggota yang dikumpulkan melalui iuran wajib, shodaqoh, maupun infaq, sehingga ada slogan “Partai Kantong Sendiri” di mana para kader menggunakan uang pribadi dalam menggerakkan aktifitasnya. Setiap bulan ada iuran tersendiri yang wajib dikeluarkan oleh tiap anggota sebesar 7% dari jumlah penghasilannya tiap bulan. Nominal iuran sebesar 7% yang ditarik dari jumlah penghasilan per bulan ini adalah ketentuan yang telah ditentukan di tingkat pusat. Dana untuk kegiatan hari besar nasional dan pengkaderan partai termasuk dalam penggunaan iuran ini. Uang inilah yang digunakan sebagai dana untuk mengadakan suatu kegiatan. Ada pula pajak penghasilan sebesar 20 % yang berasal

dari anggota PKS yang menjadi anggota DPRD yang diberikan tiap bulannya. Jika di kemudian hari ada kekurangan, maka akan diminta iuran kembali untuk menutup kekurangan dana yang dibutuhkan. Oleh karena itu, program partai akan tetap berjalan

“Partai politik tanpa dana maka tidak akan maksimal dengan hal-hal yang dikerjakan. Tetapi, bagi PKS kami itu adalah tim jadi ketika ada kekurangan dana maka sudah menjadi kesadaran kami untuk menyokong dana secara bersama agar kegiatan tetap berjalan. Walau bagaimanapun kami sudah komitmen untuk melayani masyarakat”. (wawancara dengan dr. Giri, mantan Ketua DPD PKS Kudus periode 2006-2010, pada 21 Maret 2011).

Hal senada disampaikan oleh Drs. Parjono, anggota DPRD Kudus dari FPKS tahun 2004-2009, pada 31 Mei 2011:

“Keterbatasan dana dalam mengadakan kegiatan kami atasi dengan mengeluarkan dana pribadi. Pengeluaran ini tidak terasa berat karena dilakukan bersama antaranggota” (wawancara dengan Drs. Parjono, mantan ketua FPKS DPRD Kudus tahun 2004-2010, pada 31 Mei 2011).

Terbatasnya dana membuat PKS lebih memilih kegiatan yang harus dijalankan agar dana yang tersedia itu dapat mencapai tujuan partai secara efektif dan efisien.

#### b. Tokoh PKS di Kudus

PKS di Kudus belum mempunyai tokoh yang mempunyai kharisma besar di masyarakat. tokoh PKS di Kudus yang paling senior yaitu Drs. Parjono, mantan anggota DPRD Kudus tahun 2004-2010.

“Di Kudus, kelemahan PKS yaitu karena tidak mempunyai tokoh yang disegani dan yang dijadikan panutan oleh masyarakat. Kalau kita lihat partai lain, misalnya PKB. Di Kudus, PKB yang mempunyai kultur Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai tokoh yang sangat disegani masyarakat Kudus yang juga berkultur NU yaitu Kyai H. Sya’roni Achmadi. Sedangkan, PKS di Kudus yang paling senior itu saya. Tidak ada tokoh yang mempunyai kharisma yang disegani masyarakat

Kudus. Anggota-anggota PKS dari sekitar 500 kader, 70 persen itu usia muda antara 25-40 tahun” (wawancara dengan Drs. Parjono, mantan ketua FPKS DPRD Kudus tahun 2004-2010, pada 31 Mei 2011).

Belum adanya tokoh besar di PKS mengakibatkan sulitnya mengintegrasikan masyarakat untuk mau menerima PKS. Terlebih lagi di Jawa masyarakat cenderung patrilineal dan kharisma dalam memilih tokoh tertentu sebagai pemimpin. Terlebih, PKS adalah partai baru yang belum mempunyai basis massa yang besar di Kudus.

#### c. Kultur Islam Masyarakat Kudus

Masyarakat muslim di Kudus, mayoritas mempunyai kultur Islam tradisional atau Nahdlatul Ulama (NU). Kultur Islam tradisional ini tak lepas dari pengaruh ajaran Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam di Kudus. Masyarakat Kudus yang saat itu masih memeluk agama Hindu mulai dikenalkan kepada agama Islam melalui seni budaya, misalnya wayang kulit dan gamelan. Sebelum memulai pertunjukkan wayangnya, Sunan Kudus mengikat sapi di depan tempat yang akan digunakan untuk dakwah agar masyarakat tertarik untuk datang. Hal ini dilakukan Sunan Kudus karena beliau tahu bahwa sapi adalah hewan suci dalam agama Hindu.

Pencampuran budaya masyarakat dengan ajaran baru Islam ternyata efektif bagi keberhasilan internalisasi Islam di masyarakat Kudus, tetapi hal ini menjadikan kultur Islam masyarakat Kudus tidak murni, masih tercampur dengan budaya Hindu, misalnya menyembelih hewan harus dengan menyebut nama Allah SWT tetapi masyarakat Kudus tidak



meyembelih sapi karena merupakan menghormati ajaran agama Hindu yang menganggap suci sapi.

Kultur Islam tradisional masyarakat Kudus menghambat DPD PKS Kabupaten Kudus. PKS yang merupakan partai baru yang dikenal tegas dalam menegakkan nilai-nilai Islam dianggap terlalu keras bagi masyarakat Islam tradisional Kudus. Masyarakat Islam tradisional Kudus terlanjur terbiasa dengan ajaran Islam yang dipadukan dengan budaya masa lalu, sehingga ini menyebabkan muncul pandangan bahwa PKS mengusung ideologi yang berbeda yang cenderung ke-Muhammadiyah-an. Masyarakat Islam tradisional yang cenderung ke-NU-an tidak mau untuk mengikuti ajaran yang mereka anggap cenderung seperti ajaran Muhammadiyah. Sementara itu, PKS di mata sebagian masyarakat Kudus yang Muhammadiyah menganggap bahwa PKS dengan ideologi Islamnya tidak murni lagi seperti yang diyakini Muhammadiyah.

“Hambatan kita dalam mendekati masyarakat Kudus itu karena kultur sebagian besar Kudus kan orang NU. Mereka menganggap kita itu cenderung seperti Muhammadiyah. Jadi, ketika kita mengajak mereka, misalnya kajian, mereka merasa sudah mengaji padahal di PKS ngaji itu tidak hanya sekedar Yasinan dan sebagainya tetapi juga lebih mendalami Islam dan perkembangan fikihnya. Nah, lain lagi dengan masyarakat Muhammadiyahnya, mereka menganggap kita sudah tidak murni lagi karena memang di PKS itu terbuka, anggotanya ada yang berasal dari kultur NU maupun Muhammadiyah” (wawancara dengan Drs. Parjono, mantan ketua FPKS DPRD Kudus tahun 2004-2010, pada 31 Mei 2011).

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian tentang aktualisasi visi sejahtera DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus, dapat disimpulkan:

1. Aktualisasi visi sejahtera Partai Keadilan Sejahtera dilakukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus melalui program-program kerjanya, yaitu a) Pelayanan Rakyat Adil dan Sejahtera (PRAS), b) pasar murah, c) Pos Wanita Keadilan (PWK), d) beasiswa, dan d) donor darah.

Selain itu, kader PKS yang berada di DPRD Kabupaten Kudus senantiasa mendukung rancangan kebijakan publik yang menguntungkan masyarakat yang dapat diakses secara umum. Jadi, tidak hanya memperjuangkan kepentingan partai dan konstituennya semata tetapi meliputi kepentingan umum.

2. Faktor pendukung aktualisasi visi sejahtera PKS DPD PKS Kabupaten Kudus adalah: a) solidaritas partai dan b) soliditas partai. Faktor penghambat aktualisasi visi sejahtera PKS DPD PKS Kabupaten Kudus adalah: a) keterbatasan dana, b) tokoh PKS Kudus, dan c) kultur masyarakat Kudus.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka saran penulis adalah:

- a. Bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), agar konsisten dalam melaksanakan program-program kerja partai, misalnya pelatihan keterampilan memasak,

sehingga kedekatan PKS dengan masyarakat tidak hanya dalam rangka strategi pemenangan pemilu saja.

- b. Bagi kader, agar meningkatkan keaktifan di PKS tidak hanya menjelang pemilu saja, karena kader bagi suatu partai adalah hal yang sangat penting untuk melaksanakan program partai demi tercapainya visi, misi, dan tujuan partai yang telah ditetapkan.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bafadal, Ibrahim. 2009. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar Dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cambridge Dictionary Software.
- Danim, Sudarwan. 2008. *Visi Baru Manajemen Sekolah Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Firmanzah. 2008. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Furkon, Aay Muhamad. 2004. *Partai Keadilan Sejahtera Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Teraju.
- Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Indiahono, Adwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysys*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- ‘Izzudin, Solikhin Abu. 2004. *16 Profil PK Sejahtera Solusi Masalah Bangsa*. Solo: Bina Insani Press.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru)*. Jakarta: UI Press.
- MPP. 2007. *Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera*. Jakarta: MPP PKS.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahman H.I, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riz. 2011. *MS Kaban: Parpol Bukan Majelis Taklim*. Jakarta. On line at <http://www.metrotvnews.com> [diakses tanggal 19 Jan. 2011].

Sunarto. 2004. *Sistem Politik Indonesia*. Semarang: -. (Tidak untuk dipublikasikan).

Sutomo. 2007. *Manajemen Sekolah*. Semarang: UNNES PRESS.

Tim Departemen Kaderisasi DPP PKS. 2004. *Profil Kader Partai Keadilan Sejahtera*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media.

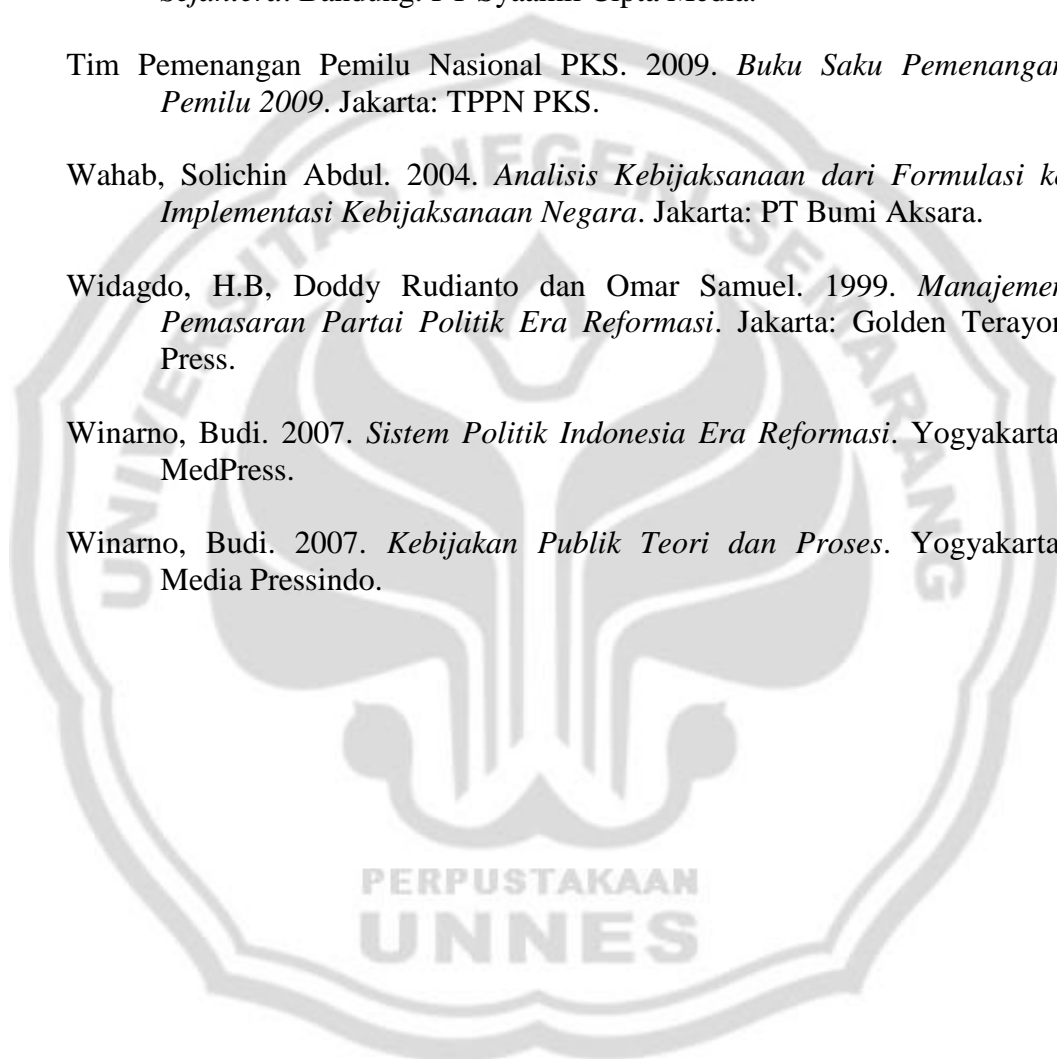
Tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS. 2009. *Buku Saku Pemenangan Pemilu 2009*. Jakarta: TPPN PKS.

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Widagdo, H.B, Doddy Rudianto dan Omar Samuel. 1999. *Manajemen Pemasaran Partai Politik Era Reformasi*. Jakarta: Golden Terayon Press.

Winarno, Budi. 2007. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: MedPress.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



### RANCANGAN INSTRUMEN PENELITIAN

No	Tujuan	Indikator	Pertanyaan	Pengumpulan Data	Subjek
1.	Mengetahui bagaimana aktualisasi visi sejahtera PKS DPD PKS Kab. Kudus.	1. Kepengurusan DPD PKS Kab. Kudus. 2. Dokumentasi dokumen partai. 3. Komunikasi antar pengurus. 4. Rekrutmen anggota partai. 5. Penyerapan aspirasi masyarakat. 6. Strategi aktualisasi visi. 7. Perjuangan visi partai sebagai partai minoritas di DPRD. 8. Peran masyarakat dalam aktualisasi visi partai.	1. Bagaimana susunan kepengurusan DPD PKS Kab. Kudus? 2. Dari sekian orang yang ada dalam kepengurusan, berapa orang yang aktif? 3. Apakah terdapat kepengurusan PKS di tingkat cabang dan ranting? Di mana saja kantornya? 4. Bagaimana tanggapan terhadap label bahwa pengurus partai politik lebih aktif hanya ketika menjelang pemilu? 5. Berapa frekuensi rapat koordinasi yang dilakukan? 6. Siapa saja yang terlibat dalam rapat koordinasi? 7. Bagaimana cara pengambilan keputusan dalam rapat? 8. Adakah buku-buku untuk pembukuan rapat dan pembukuan yang lain? 9. Apakah antara kepengurusan di tingkat	Wawancara, observasi dan dokumentasi.	Ketua DPD PKS, Sekretaris DPD PKS, kader PKS di DPRD Kab. Kudus, masyarakat Kudus.

			<p>bawah (misal DPC) selalu berkoordinasi dengan tingkat kepengurusan di atasnya (DPD)?</p> <p>10. Adakah seleksi dalam penempatan pengurus dalam kepengurusan?</p> <p>11. Apa yang dilakukan partai untuk merekrut anggota?</p> <p>12. Adakah seleksi dalam merekrut anggota partai?</p> <p>13. Apa saja kegiatan yang harus diikuti selama menjadi anggota partai?</p> <p>14. Apa yang dilakukan partai untuk mencari data mengenai apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat Kudus?</p> <p>15. Apa yang dilakukan partai untuk mewujudkan keinginan masyarakat Kudus?</p> <p>16. Apa strategi partai untuk mewujudkan kehendak bersama masyarakat Kudus?</p> <p>17. Bagaimana profil kader PKS di DPRD Kab. Kudus saat ini?</p> <p>18. Apakah ada seleksi untuk menentukan siapa</p>		
--	--	--	--	--	--



			<p>yang dicalonkan sebagai kader yang nantinya akan menjabat di DPRD?</p> <p>19. Apa faktor yang menyebabkan penurunan jumlah kader di DPRD?</p> <p>20. Bagaimana tanggapan mengenai masyarakat lebih melihat figur daripada program yang diusung dalam pemilu?</p> <p>21. Dengan hanya ada satu orang kader di DPRD tentunya akan menyebabkan penggabungan di fraksi partai lain. Partai apa yang dipilih sebagai fraksi gabungan?</p> <p>22. Apa faktor yang menyebabkan memilih partai tersebut sebagai fraksi gabungan?</p> <p>23. Apa yang dilakukan agar perjuangan partai tetap terlaksana dalam gabungan fraksi itu?</p> <p>24. Bagaimana ketika terjadi pengambilan keputusan dalam fraksi gabungan?</p> <p>25. Hal yang mungkin dilakukan sebagai partai minoritas di DPRD adalah memberikan pengaruh ideologi partai dalam usaha perumusan kebijakan. Adakah keputusan</p>	
--	--	--	---	--

	<p>2. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung aktualisasi visi sejahtera PKS DPD PKS Kab. Kudus.</p>	<p>1. Sumber daya manusia (pengurus DPD PKS).  2. Dana DPD PKS.  3. Fasilitas.  4. Kendala-kendala yang dihadapi DPD PKS dalam aktualisasi visi sejahtera PKS.</p>	<p>yang merupakan hasil pengaruh dari PKS?  26. Bagaimana respon masyarakat terhadap apa yang dilakukan PKS?  27. Apa peran serta masyarakat umum dalam perjuangan PKS?</p> <p>1. Apa latar pendidikan pengurus DPD PKS Kab Kudus?  2. Dari mana sumber dana partai?  3. Apa fasilitas partai yang dapat mendukung perjuangan partai?  4. Apa faktor pendukung lainnya dalam aktualisasi visi sejahtera PKS?  5. Apa faktor penghambat yang dihadapi dalam aktualisasi visi sejahtera PKS?  6. Apa yang dilakukan partai jika terjadi hal-hal yang menghambat aktualisasi visi sejahtera PKS?</p>	<p>Wawancara, observasi dan dokumentasi.</p>	<p>Ketua DPD, Sekretaris DPD PKS Kab. Kudus.</p>
--	---	--	---	--	--

## DATA INFORMAN



Nama : dr. Bahana Sugiri  
 Alamat : Jekulo, Kudus  
 Pekerjaan : Dokter umum  
 Jabatan : mantan Ketua DPD PKS Kudus tahun 2006-2010 dan mantan anggota DPRD Kudus tahun 2004-2009.

ada 16 Maret 2011.



Nama : Sayyid Yunanta, S.T  
 Alamat : Jati Wetan, Kudus  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Jabatan : mantan Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPD PKS Kudus tahun 2006-2010.

id pada 19 Maret 2011.



Nama : Aris Rahargianto, A.Md  
 Alamat : Purwosari, Kudus  
 Pekerjaan : *Engineer* PT. Djarum  
 Jabatan : mantan Sekretaris DPD PKS  
 tahun 2006-2010

Gb. 3 Wawancara dengan Pak Aris pada 10 Februari 2011.

Nama : Drs. Parjono  
 Alamat : Bakalan Krapyak, Kudus  
 Pekerjaan : Guru  
 Jabatan : mantan anggota DPRD Kudus  
 Tahun 2004-2009.



Nama : Setia Budi W., S.Ag., M.M.  
 Alamat : Kaliputu, Kudus  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kudus 2009-  
 2014  
 Jabatan : mantan anggota DPRD Kudus  
 tahun 2004-2009.

Gb. 4. Wawancara dengan Pak Bowo pada 21 Maret 2011.



Nama : Arie Widiana, A.Md  
 Alamat : Pasuruhan Kidul, Kudus  
 Pekerjaan : Kepala Sekolah TKIT  
 Jabatan : mantan Ketua bidang  
 Kewanitaan DPD PKS Kudus tahun 2006-2010

Gb. 5. Wawancara dengan Bu Arie pada 18 April 2011.

Nama : Aeda Erna, S.K.M., M.Si  
 Alamat : Kaliputu, Kudus  
 Pekerjaan : PNS  
 Jabatan : Simpatisan PKS Kudus

Nama : Syakdiyah  
 Alamat : Peganjaran, Kudus  
 Pekerjaan : Guru TKIT  
 Jabatan : Kader PWK PKS Kudus

Nama : Raudloh  
 Alamat : Bakalan Krapyak, Kudus  
 Pekerjaan : -  
 Jabatan : Kader PWK PKS





Nama : Sulhan Hamith  
Alamat : Loram Wetan, Kudus  
Pekerjaan : Perangkat Desa  
Jabatan : Simpatisan PKS

Gb.6. wawancara dengan Pak Sulhan pada 11 April 2011.



## FOTO KEGIATAN



Gb.6 Pelaksanaan Pasar Murah di Mejobo



Gb.7 Peresmian PWK Undaan



Gb. 8 Pelaksanaan Lomba PWK Terbaik



Gb.9 Pelaksanaan Pasar murah di Prambatan



Gb. 10 Pelaksanaan PRAS di Bae



Gb. 11 Kantor DPD PKS Kudus

